



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR



LAPORAN

*Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah*

(LAKIP)

TAHUN 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar merupakan Perencanaan Kinerja Tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Tahun 2019-2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 melaporkan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan merupakan gambaran hasil dari Rencana Kinerja tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) DPMPSTP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 – 2024, Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2022 pada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai 4 Program, 10 Kegiatan dan terdiri dari 29 Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan tujuan indikator penetapan kinerja.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Capaian Sasaran menunjukkan bahwa tingkat pencapaian tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan sebagian telah terealisasi dan mencapai target, ini menandakan bahwa pelaksanaan kinerja Tahun 2022 pencapaiannya sangat baik dan berhasil.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 ini disajikan beberapa pokok permasalahan berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara menyeluruh, yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.;
2. LAKIP ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategi terkait 4 (Empat) Program, 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima Sub Kegiatan);
3. Dari sasaran yang ditetapkan pada tahun 2022 ini, telah diwujudkan dalam rincian mengenai capaian kinerja sasaran yang secara lengkap dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar;
4. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar terlihat dari pencapaian sasaran strategi yang ditetapkan dan secara keseluruhan dapat diwujudkan dengan baik;

Kami menyadari bahwa informasi yang kami sajikan dalam LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak serta tidal luput dari kekurangan. Untuk itu LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar siap menerima saran, kritikan maupun koreksi demi untuk penyempurnaan LAKIP ini pada masa-masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya SKPD untuk menjelaskan dan menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama Tahun 2022 sebagai komitmen untuk dapat meningkatkan kinerja instansi, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta capaian sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan misi SKPD yaitu **Meningkatkan Investasi Daerah dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan**, sesuai yang telah diterapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024

Hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh pejabat dan staf dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan, juga peran masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan publik di DPMPSTP serta aparat pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam perumusan kebijakan maupun implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan sebagai wujud dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2022. Disamping itu laporan ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu program / kegiatan dengan menggunakan indikator yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dimaksud untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien serta perkiraan manfaat dan dampak yang ditimbulkan.

Disadari walaupun didalam penyusunan LAKIP ini telah diusahakan secara maksimal namun masih banyak kekurangan atau kelemahannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 disampaikan, atas perhatian dan masukan dari semua pihak, diucapkan terima kasih. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 bermanfaat bagi kita semua dalam upaya peningkatan kinerja organisasi.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Polewali, 10 Februari 2023



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar,

Dr. MUJAHIDIN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi..... | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 16 |
| A. Rencana Strategis | 16 |
| B. Penetapan Kinerja Tahun 2022 | 22 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN | 25 |
| A. Akuntabilitas Kinerja | 26 |
| B. Akuntabilitas Keuangan..... | 109 |
| BAB IV PENUTUP | 119 |
| LAMPIRAN : | |
| I. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | |
| II. Pengukuran Kinerja Tahun 2022 | |
| III. Realisasi Anggaran Tahun 2022 | |

DAFTAR TABEL

| | | | |
|-----------------|---|-------|-----------|
| Tabel 1 | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon / Pejabat | | 7 |
| Tabel 2 | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan | | 8 |
| Tabel 3 | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan | | 8 |
| Tabel 4 | : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin | | 9 |
| Tabel 5 | : Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang | | 8 |
| Tabel 6 | : Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 - 2024 | | 21 |
| Tabel 7 | : Penetapan Kinerja Tahun 2022 | | 24 |
| Tabel 8 | : Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 | | 27 |
| Tabel 9 | : Data Target dan Capaian Realisasi Nilai Investasi berdasarkan Laporan Realisasi Investasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Tahun 2022 | | 30 |
| Tabel 10 | : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi LKPM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 | | 35 |
| Tabel 11 | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Nilai Investasi Tahun 2022 | | 36 |
| Tabel 12 | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Nilai Investas Tahun 2022 | | 47 |
| Tabel 13 | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Tahun 2022 | | 49 |
| Tabel 14 | : Data Hasil Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Periode Tahun 2022 | | 65 |
| Tabel 15 | : Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Indeks Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 | | 67 |
| Tabel 16 | : Perbandingan antara Target dan realisasi Anggaran Penunjang Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 | | 68 |
| Tabel 17 | : Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 | | 71 |
| Tabel 18 | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 | | 73 |
| Tabel 19 | : Jenis dan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 | | 74 |

| | | | |
|-----------------|---|-------|------------|
| Tabel 20 | : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Berdasarkan Reviu dari Inspektorat Penilaian Lakip Tahun 2021 | | 82 |
| Tabel 21 | : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2019 s/d Tahun 2021 | | 84 |
| Tabel 22 | : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Peninjauan Indikator Kerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 85 |
| Tabel 23 | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah | | 88 |
| Tabel 24 | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 | | 89 |
| Tabel 25 | : Data Indikator Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 91 |
| Tabel 26 | : Data Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 s/d Tahun 2022 | | 93 |
| Tabel 27 | : Perbandingan Target dan realisasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan asset Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 94 |
| Tabel 28 | : Analisis Efisiensi Sumberdaya yang dilakukan pada Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan aset Perangkat Daerah | | 97 |
| Tabel 29 | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan aset Perangkat Daerah Tahun 2022 | | 98 |
| Tabel 30 | : Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik pad Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 100 |
| Tabel 31 | : Data Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 s/d 2022 | | 102 |
| Tabel 32 | : Alokasi Anggaran Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 103 |
| Tabel 33 | : Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah Tahun 2022 | | 107 |

| | | | |
|-----------------|--|-------|------------|
| Tabel 34 | : Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat daerah Tahun 2021 | | 108 |
| Tabel 35 | : Realisasi Anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 | | 113 |
| Tabel 36 | : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. | | 117 |

DAFTAR GAMBAR

| | | | | |
|-----------------|---|--|-------|------------|
| Gambar 1 | : | Diagram batang perbandingan antara Target dan Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2022 | | 28 |
| Gambar 2 | : | Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Investasi Tahun 2022 | | 30 |
| Gambar 3 | : | Diagram Batang Perbandingan antara Target dan ralisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022 | | 66 |
| Gambar 4 | : | Diagram Garis Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Indeks Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 | | 68 |
| Gambar 5 | : | Diagram Batang Perbandingan antara Bobot dan Nilai pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2022 | | 83 |
| Gambar 6 | : | Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Persentase Tertib Pengolahan Keuangan dan asset Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 | | 92 |
| Gambar 7 | : | Diagram Batang Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | | 101 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penilaian dan Pelaporan kinerja Pemerintah Daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel dan efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat termasuk pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna sesuai tuntunan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Yang dilanjutkan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Langkah pembentukan organisasi tersebut, harus diikuti pula dengan perspektif manajemen yang profesional. Dalam Hal ini, manajemen birokrasi harus diarahkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki sehingga bersinergi dengan tujuan dibangunnya organisasi. Upaya serius dalam menciptakan perspektif manajemen birokrasi yang mampu menjawab kebutuhan lingkungan internal dan eksternal harus dilakukan, baik pada tahapan planning, organizing, actuating maupun controlling.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government). Sesuai dengan siklusnya setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022 instansi wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengkalsifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategi organisasi yang dituangkan melalui Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam menyusun dan menyampaikan kepada Bupati berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat LAKIP. Penyusunan LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (LAKIP) Tahun 2022 ini antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019.
6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.



1.1.



Untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi dapat dipenuhi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar yang selaras tiap tahunnya ditetapkan dengan program dan kegiatan. Maka maksud dan tujuan penyusunan dan pentampaian LAKIP Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk keperluan eksternal organisasi menjadikan LAKIP Tahun 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban yang memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Untuk keperluan internal organisasi menjadikan LAKIP Tahun 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas untuk upaya perbaikan berkesinambing bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Kedudukan Tugas, Pokok dan Fungsi

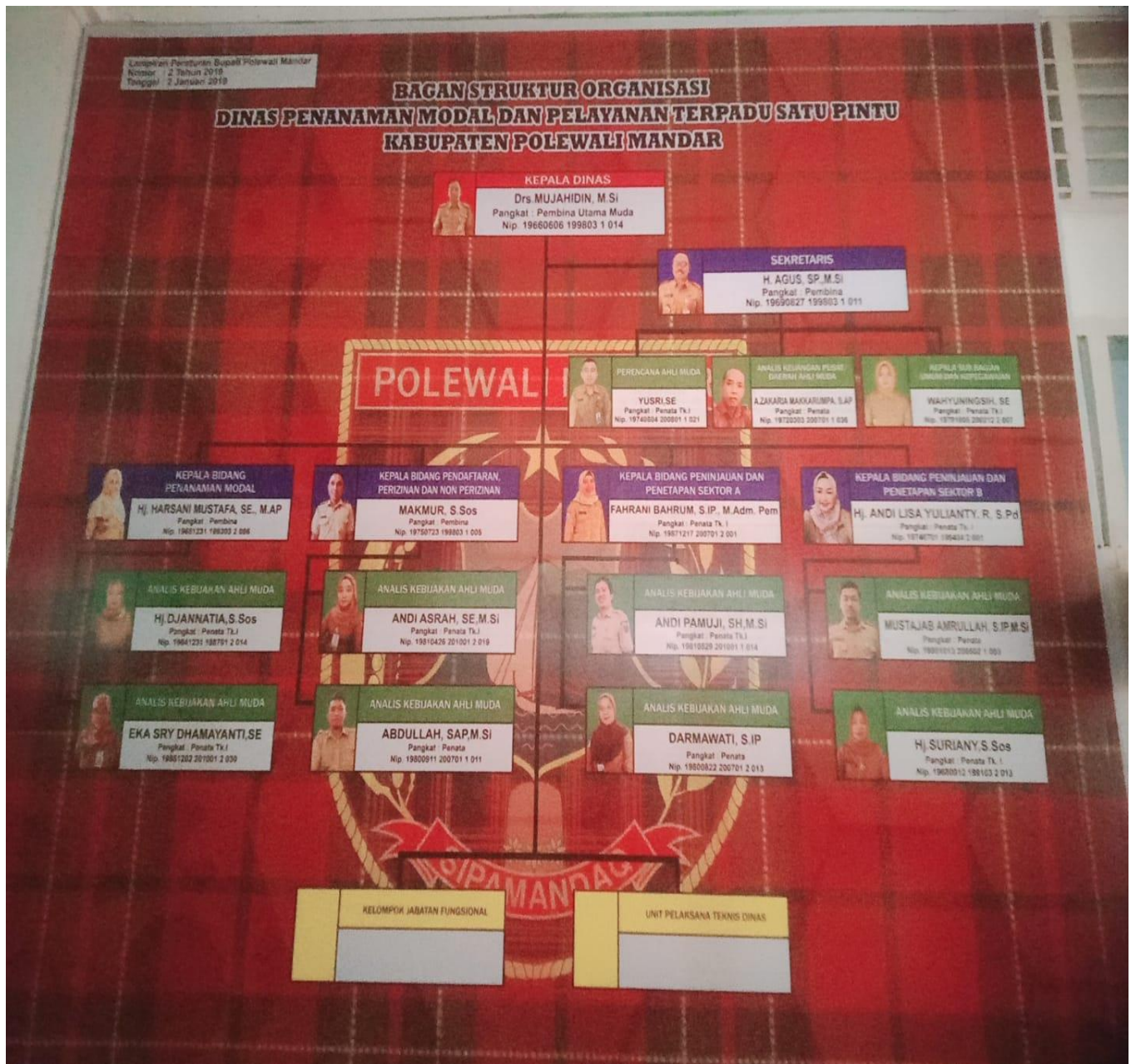
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi ,tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 adalah sebagai berikut

1. **Kepala;**
2. **Sekretariat :**
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. **Bidang Penanaman Modal :**
 - a. Seksi Perencanaan Pengendalian, Sistem Informasi dan Pengawasan Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

4. **Bidang Pelayanan Informasi Pengaduan dan Pendaftaran**
 - a. Seksi Pendaftaran Verifikasi dan Pelaporan Perizinan
 - b. Seksi layanan Informasi, Pengaduan, Konsultasi, Pengawasan Dan Penyuluhan
5. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A**
 - a. Seksi Peninjauan Sektor A
 - b. Seksi Penetapan Sektor A
6. **Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B**
 - a. Seksi Peninjauan Sektor B
 - b. Seksi Penetapan Sektor B
7. **Kelompok Jabatan Fungsional.**



Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 16 Tahun 2020 pada Bab II Bagian Pertama dari penjabaran Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas dijelaskan bahwa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud diatas, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dimana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar didukung oleh aparat dengan susunan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Eselon / Jabatan

Tabel 1 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Eselon/Pejabat

| No. | Eselon | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | II | 1 | - | 1 |
| 2 | III | 2 | 3 | 5 |
| 3 | IV | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Staf | 0 | 8 | 8 |
| Jumlah | | 8 | 17 | 25 |

Keadaan Per 31 Desember 2022

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 2 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Golongan

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | I | - | - | - |
| 2 | II | - | 1 | 1 |
| 3 | III | 5 | 15 | 20 |
| 4 | IV | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | | 8 | 17 | 25 |

Keadaan Per 31 Desember 2022

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Golongan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Laki-Laki | Perempuan | |
| 1 | SD | - | - | - |
| 2 | SMP/Sederajat | - | - | - |
| 3 | SLTA/Sederajat | - | 1 | 1 |
| 4 | Sarjana Muda/D3 | - | - | - |
| 5 | Strata 1 (S1) | 2 | 13 | 15 |
| 6 | Strata 2 (S2) | 6 | 3 | 9 |
| Jumlah | | 8 | 17 | 25 |

Keadaan Per 31 Desember 2022

d. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4 : Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jenis Kelamin

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|---------------|-----------|
| 1 | Laki-Laki | 8 |
| 2 | Perempuan | 17 |
| Jumlah | | 25 |

Keadaan Per 31 Desember 2022

Dalam pencapaian target kinerja selain didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memadai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar juga didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai sehingga sangat menentukan efektifitas kinerja organisasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5 : Kondisi Sarana dan Prasarana Penunjang

| No | Sarana | Jumlah | Keadaan | | |
|----|--------------------------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | Baik | Kurang Baik | Rusak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | <u>TAHUN 2016</u> | | | | |
| 1 | Papan Informasi | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Server | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Rak Koran | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Wireles Router | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Siaber | 1 | 1 | - | - |
| 6 | AC | 3 | 3 | - | - |
| 7 | Jam Dinding | 2 | 2 | - | - |
| 8 | Komputer PC | 5 | 5 | - | - |
| 9 | Kursi Kayu | 7 | 7 | - | - |
| 10 | Kursi Lipat | 5 | 5 | - | - |
| 11 | Kursi Putar | 2 | 2 | - | - |
| 12 | Lemari Kayu | 3 | 3 | - | - |
| 13 | Meja ½ Biro | 9 | 9 | - | - |
| 14 | Meja Komputer | 6 | 5 | 1 | - |
| 15 | Printer | 5 | 5 | - | - |
| 16 | Sapu | 2 | 2 | - | - |
| 17 | Sendok Sampah | 2 | 2 | - | - |
| 18 | Tempat Sampah | 3 | 3 | - | - |
| 19 | UPS | 1 | - | - | 1 |
| 20 | Gordeng Panjang | 5 | 5 | - | - |
| 21 | Gordeng Pendek | 8 | 8 | - | - |
| 22 | TV | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----|---|---|
| 23 | Meja Pelayanan | 6 | 6 | - | - |
| 24 | Papan Struktur | 1 | 1 | - | - |
| 25 | Papan Visi dan Misi | 1 | 1 | - | - |
| 26 | Kursi Tunggu | 3 | 3 | - | - |
| 27 | Meja Gantung | 1 | 1 | - | - |
| 28 | Sekat | 2 | 2 | - | - |
| 29 | Laptop | 1 | 1 | - | - |
| 30 | Sepeda Motor | 1 | 1 | - | - |
| 31 | Dispenser | 1 | 1 | - | - |
| 32 | Filling Cabinet | 1 | 1 | - | - |
| 33 | Gordeng Biasa | 2 | 2 | - | - |
| 34 | Kursi Panjang | 1 | 1 | - | - |
| 35 | Kursi Plastik | 4 | 4 | - | - |
| 36 | Kursi Putar Besar | 4 | 4 | - | - |
| 37 | Meja Biro | 3 | 1 | 2 | - |
| 38 | Meja Panjang | 1 | 1 | - | - |
| 39 | Mesin Ketik | 2 | - | - | 2 |
| 40 | Monitor | 2 | 2 | - | - |
| 41 | Sapu Ijuk | 1 | 1 | - | - |
| | <u>TAHUN 2017</u> | | | | |
| 1 | AC 1 PK | 4 | 4 | - | - |
| 2 | Lemari Arsip 2 Pintu | 5 | 5 | - | - |
| 3 | Komputer | 4 | 4 | - | - |
| 4 | Laptop | 3 | 3 | - | - |
| 5 | Printer | 8 | 8 | - | - |
| 6 | UPS/Stabilizer | 6 | 6 | - | - |
| 7 | Meja Kerja 1 biro | 5 | 5 | - | - |
| 8 | Meja Kerja Staf | 5 | 6 | - | - |
| 9 | Meja Rapat | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II | 1 | 1 | - | - |
| 11 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | 4 | 4 | - | - |
| 12 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV | 10 | 10 | - | - |
| 13 | Kursi Kerja Staf | 5 | 5 | - | - |
| 14 | Kursi Tunggu | 6 | 6 | - | - |
| 15 | Kursi Tamu/Ruang Tunggu | 1 | 1 | - | - |
| 16 | Kursi Tamu Eselon III | 1 | 1 | - | - |

| | | | | | |
|----|--------------------------|----|----|---|---|
| 17 | Kursi Rapat | 20 | 20 | - | - |
| 18 | Sofa Ruang Pejabat | | | | |
| | Eselon II | 1 | 1 | - | - |
| 19 | Dispenser | 4 | 4 | - | - |
| 20 | Kulkas | 1 | 1 | - | - |
| 21 | TV | 6 | 6 | - | - |
| 22 | WirelesToa | 1 | 1 | - | - |
| 1 | <u>TAHUN 2018</u> | 4 | 4 | - | - |
| 2 | Motor | 1 | 1 | - | - |
| 3 | Laptop | 4 | 4 | - | - |
| | Printer | | | | |
| 1 | <u>TAHUN 2019</u> | 2 | 2 | - | - |
| 2 | Laptop | 1 | 1 | - | - |
| 3 | LCD Proyektor | 1 | 1 | - | - |
| | Layar Proyektor | | | | |
| | <u>TAHUN 2020</u> | | | | |
| 1 | Laptop | 3 | 3 | - | - |
| 2 | Printer | 3 | 3 | - | - |
| 3 | Filing Kabinet | 2 | 2 | - | - |
| 4 | Kursi Rapat | 24 | 24 | - | - |
| 5 | Meja Rapat | 8 | 8 | - | - |
| | <u>TAHUN 2021</u> | | | | |
| 1 | AC 2 PK | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Meja Biro | 4 | 4 | - | - |
| 3 | Meja Kerja' | 4 | 4 | - | - |
| 4 | Lemari Arsip | 1 | 1 | - | - |
| 5 | Laptop Asus | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Komputer PC All In One | 3 | 3 | - | - |
| 7 | Printer Epson | 4 | 4 | - | - |
| 8 | Tempat Parkir | | | | |
| | Kendaraan | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Drone | 1 | 1 | - | - |

| <u>TAHUN 2022</u> | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|----|---|---|
| 1 | AC 2 PK | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Kursi Kerja | 3 | 3 | - | - |
| 3 | Lemari Buku/Arsip | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Kursi Rapat | 15 | 15 | - | - |
| 5 | Kursi Susun | 5 | 5 | - | - |
| 6 | Meja Kerja | 8 | 8 | - | - |
| 7 | Speaker Aktif | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Laptop | 1 | 1 | - | - |
| 9 | Komputer PC All In One | 8 | 8 | - | - |
| 10 | Printer | 9 | 9 | - | - |

Keadaan Per 31 Desember 2022

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Penanaman modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas pokok membantu Bupati memelihara dan melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas perbantuan di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal dan PTSP
- c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di Bidang Penanaman Modal dan PTSP
- d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan sesuai dengan Bidang tugasnya.

Fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan melalui kegiatan penanaman modal. Fungsi pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelaynan terpadu satu pintu dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan dan pengaduan. Fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan melalui pengawasan, pengelolaan data dan informasi.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Berhubungan hal yang menjadi isu strategis di dalam meningkatkan fungsi dan peran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

- a. Kualitas SDM aparatur yang professional
- b. Dukungan sarana dan prasarana
- c. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai aspek strategis penunjang tugas pelayanan
- d. Dukungan SKPD Terkait dalam untuk sinergitas dan sinkronisasi

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja serta kajian terhadap pencapaian kinerja rencana strategis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar. Menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Polewali Mandar
2. Anggaran penyelenggaraan pameran promosi investor yang masih terbatas.
3. Belum terbentuknya regulasi tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman modal dan Penyederhanaan Prosedur perizinan dan non perizinan yang akan menunjang dalam pengembangan investor di Kabupaten Polewali Mandar
5. Penyelesaian rata-rata lama waktu izin yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang sudah diatur oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) disebabkan rekomendasi izin yang lama dari instansi terkait.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar.dirumuskan sebagai berikut :

1. Urusan Penanaman Modal :

1. Rendahnya minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah
2. Masih kurangnya promosi investasi daerah kepada pemilik modal
3. Belum maksimalnya norma, standar dan prosedur perizinan investasi daerah
4. Terbatasnya sarana fasilitas pendukung pengembangan informasi penanaman modal.

2. Urusan Perizinan :

- a. Masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) dan Personil Pelayanan Perizinan
- b. Masih kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang pelayanan perizinan
- c. Masih perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dengan SKPD Teknis terkait prosedur pelayanan perizinan
- d. Masih adanya regulasi yang perlu di evaluasi dan disempurnakan terutama yang berhubungan dengan standar operation prosedur (SOP).

Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang yang menjelaskan secara singkat tentang pentingnya akuntabilitas, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan laporan. Dan Memuat Kedudukan tugas, pokok dan fungsi yang menjelaskan secara umum tentang organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi

Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Memuat Rencana Strategis yang menjelaskan secara singkat Renstra meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja utama/sasaran dan memuat Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang menjelaskan Target Kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Memuat Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tujuan per sasaran dan perindikator sasaran dan dijelaskan data kinerja berupa tabel atau grafik dan penjelasan memadai lainnya. Dan Memuat pula Akuntabilitas Keuangan yang menguraikan informasi yang cukup terkait akuntabilitas keuangan satuan kerja.

Bab IV : PENUTUP

Memuat Uraian umum atas capaian kinerja serta langkah-langkah dimasa datang organisasi

LAMPIRAN

Memuat Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berisi rumusan kebijakan, strategi dan program-program prioritas dalam jangka menengah lima tahun yang diharapkan dapat menjamin

pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang merupakan instrument pertanggung jawaban, Renstra merupakan langkah awal untuk melukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Renstra mengandung Visi, Misi, tujuan, dan

sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.



a. Visi

“ Terwujudnya Iklim Investasi yang sehat dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang sehat dan akuntabel”

Makna visi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi
- Terwujudnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas
- Terwujudnya Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan yang optimal.

Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bersama-sama pihak berkepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan dibawa dan sekaligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka disiplin aparaturnya mewujudkan pelayanan prima menuju pemerintahan yang baik.

Dengan penetapan Visi tersebut diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yaitu **“POLEWALI MANDAR MAJU RAKYAT SEJAHTERA”**. Didukung oleh aparatur yang berwawasan luas, bermoral, penuh dedikasi dan bebas KKN.

Visi dan misi Pemerintah Polewali Mandar tersebut dapat dilihat dari peningkatan iklim investasi di daerah dan pemberian pelayanan perizinan kepada masyarakat yang berkaitan erat dengan Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskanlah misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Makna Misi yang dimaksud adalah ::

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi investor untuk menguatkan daya saing perekonomian Daerah.
- b. Mempercepat peningkatan Penanaman Modal.
- c. Menyusun dan mengembangkan kebijakan/strategi promosi Penanaman Modal di Daerah.
- d. Mendorong dan meningkatkan interaksi sarana stakeholder baik kalangan dunia usaha perbangkan termasuk pemerintah sehingga dapat mengembangkan kemitraan.

2. Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang cepat, tepat akuntabel

Makna Misi yang dimaksud adalah :

“ Terciptanya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang sederhana dan adanya kepastian hukum serta tertib administrasi didalam pengelolaannya. “

3. Peningkatan Kualitas Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan

Makna Misi yang dimaksud adalah ::

“ Bahwa Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian secara terus menerus akan mampu memberikan iklim investasi yang lebih baik.”

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari misi untuk mewujudkan visi Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar selama kurun waktu 2014-2019. Tujuan dan Sasaran pada masing-masing Misi diuraikan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi serta Sarana dan Prasarana Penanaman Modal

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Promosi dan Iklim Investasi

Sasaran:

Meningkatkan Promosi dan Iklim Investasi

- 2) Mewujudkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas serta tertib Administrasi yang cepat, tepat dan akuntabel

Tujuan :

Terwujudnya Pelayanan Perizinyang berkualitas

Sasaran:

Meningkatkan Kualitas Layanan Perizinan

- 3) Meningkatnya Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian

Tujuan :

Terwujudnya perlindungan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan yang optimal

Sasaran :

Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin yang diterbitkan.

d. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014-2019, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menetapkan sasaran strategis beserta Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis:

- a. Meningkatkan Investasi Daerah
- b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

2. Indikator Kinerja

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi Daerah , terdiri dari indikator:

- Nilai Investasi

b. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 1 indikator:

- Indeks kepuasan Pengguna pelayanan perizinan dan non perizinan



Adapun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar yang memuat tujuan dan sasaran serta pencapaian target dalam lima tahun kedepan Tahun 2019 s/d 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel.6

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019-2024

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|---|---|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang merata dan berkualitas | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN | Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN | 170.650.000.000 | 192.985.000.000 | 98.650.000.000 | 118.450.000.000 | 140.750.000.000 | 165.150.000.000 |
| | | | | Meningkatnya Investasi Daerah | 2.000.000.000 | - | - | - | - |
| | | | | Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan | Meningkatnya Kualitas Layanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks kepuasan pelayanan perizinan dan non perizinan | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| | | | | Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran | B | BB | A | A | A |
| | | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |

B. Penetapan Kinerja Tahun 2022



Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menyusun suatu Rencana Kinerja (performanceplan) setiap tahunnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan dari proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Selain dari RKT, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar juga membuat Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Dengan demikian, Penetapan Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penetapan Kinerja berubah menjadi Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dalam Dokumen Penetapan Kinerja atau yang berganti menjadi Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu:

a. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan harus berorientasi hasil.

b. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.

c. Target

Merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Baca juga : Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitori
5. ng, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Penetapan Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET |
|----|---|--|----------------------|
| 1 | Membbaiknya iklim investasi daerah | 1 Nilai Investasi | 118.450.000.000 (Rp) |
| 2 | Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu | 1 Indeks kepuasan pengguna pelayanan | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | 1 Predikat SAKIP perangkat daerah | A |
| | | 2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100% |
| | | 3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik |

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja

adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penilaian, melainkan sebagai alat komunikasi dari alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah

Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja serta tindakan perbaikan yang diperlukan ke depan. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal dalam pelaksanaan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas selain dipandang dari segi kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah, tetapi juga apakah pengalokasian dan pemanfaatan anggaran tepat

sasaran, dilakukan secara transparan dan hasil kerjanya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Perbandingan Capaian Kinerja antara Target dan Realisasi untuk Tahun 2022 indikator ini, dapat dilihat dari tabel dan diagram batang di bawah ini:

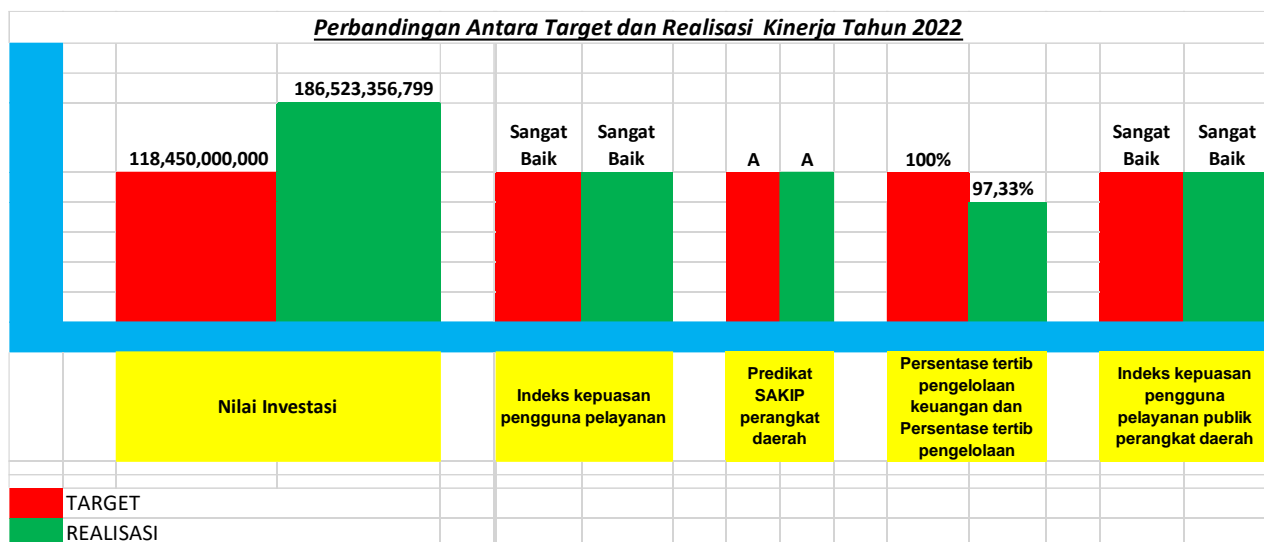
Tabel 8 : Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022.

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | CAPAIAN TARGET KINERJA | % |
|-----|---|--|-----------------|------------------------|-------|
| 1 | Membaiknya iklim investasi daerah | 1 Nilai Investasi | 118.450.000.000 | 186.523.356.799 | 157 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu | 1 Indeks kepuasan pengguna pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik | 100 |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | 1 Predikat SAKIP perangkat daerah | Baik | Baik | 100 |
| | | 2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100 | 97,33 | 97,33 |
| | | 3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik | Sangat Baik | 100 |

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa dari indikator kinerja sasaran dapat terealisasi sangat baik dimana Program dan

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator tersebut berjalan sesuai pelaksanaan yang tepat waktu. Bahkan ada Indikator Kinerja Sasaran yang melampaui Target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar Diagram batang dibawah ini :

Gambar 1 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2022



Sasaran Strategis

Membaiknya iklim investasi daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Nilai Investasi



Pada Sasaran Strategis Membaiknya Iklim Investasi daerah terdapat Indikator Kinerja Sasaran Nilai Investasi Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Nilai Realisasi Investasi Daerah dari Tahun ke Tahun yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Bidang Penanaman Modal.

Adapun Metode Perhitungan Indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN dapat diketahui dari Nilai Investasi yang masuk dalam setiap tahunnya.

**MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN INI**

Sebagai gambaran Data Target dan Realisasi Nilai Investasi yang dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9 : Data Target dan Capaian Realisasi Nilai Investasi berdasarkan Laporan Realisasi Investasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Tahun 2022.

| NO. | INDIKATOR KINERJA SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | PERSEN (%) |
|-----|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 1 | Nilai Investasi | Rupiah | 118.450.000.000 | 186.523.356.799 | 157 |

Gambar 2 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Investasi Tahun 2022.



Berdasarkan Tabel diatas target indikator kinerja Sasaran **nilai**

investasi mengalami kenaikan nilai realisasi investasi dari tahun sebelumnya, tercapainya target indikator ini berkat dukungan dari para pelaku usaha untuk mendaftarkan investasi usahanya dan Para pelaku usaha atau perusahaan untuk melaporkan investasinya yang sesuai dengan hasil pemantauan dari tim Penanaman modal kabupaten polewali mandar yang terjun langsung memantau para pelaku usaha. Adapun kegiatan yang mendukung indikator nilai investasi ini yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota kemudian Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal serta Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal. Dimana dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan adanya peningkatan Nilai Realisasi Investasi Daerah di Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan sebanyak Rp. 118.450.000.000 dan Realiasi nilai investasi berdasarkan LKPM di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 sebesar **Rp. 186.523.356.799.** Target tersebut dapat dicapai dan bahkan telah melampau target yang di tetapkan sehingga persentase capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran nilai investasi capaiannya sebesar **157 persen.**

Untuk capaian jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan yang terdaftar di LKPM untuk tahun 2022 sebanyak **667 tenaga kerja** dan jumlah laporan yang masuk sebanyak **87 Laporan**



Laporan Triwulan I Bulan Januari-April Tanggal 1-10

| Top 3 Sektor Usaha | | | |
|--------------------|--|--|--|
| Perdagangan | | | |
| Industri | | | |
| Perumahan | | | |

| LKPM TRIWULAN I | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|----|
| Tambahan Realisasi (Rp) | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan | |
| PMA | - | - | - |
| PMD | Rp.11.910.000.000 | 38 | 19 |
| Total | Rp.11.910.000.000 | 38 | 19 |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Triwulan I dari 14 Perusahaan
- Jumlah Tambahan Realisasi Investasi
- Rp10.791.900.000 total realisasi investasi
 - Rp. 11.910.000.000
- Melaporkan melalui system yang lama OSS dan Pelaporan LKPM terpisah dan memakai model yang lama
 - (Beda Link)



Laporan Triwulan II Bulan April-Juli tanggal 1-10

| LKPM TRIWULAN II | | | |
|-------------------------|--------------------|----------------|----|
| Tambahan Realisasi (Rp) | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan | |
| PMA | - | - | - |
| PMD | Rp. 12.683.725.915 | 175 | 17 |
| Total | Rp. 12.683.725.915 | 175 | 17 |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Triwulan II dari 9 Perusahaan
- Jumlah tambahan Realisasi Investasi
- Rp10.702.159.000 total realisasi investasi Rp. 12.683.725.915
- Melaporkan melalui system yang baru tanggal 1 April louncing OSS RBA Terbaru dengan pelaporan terbaru lkpm bergabung dengan OSS

Laporan Triwulan III Bulan Juli-Oktober Tanggal 1-10

| LKPM TRIWULAN III | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------|----|
| Tambahan Realisasi (Rp) | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan | |
| PMA | - | - | - |
| PMD | Rp. . 50.424.094.565 | 232 | 24 |
| Total | Rp. . 50.424.094.565 | 232 | 24 |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Triwulan III dari 12 Perusahaan
- Jumlah tambahan Realisasi Investasi
- Rp24.348.269.194 total realisasi investasi Rp. 50.424.094.565
- Melaporkan melalui system OSS-RBA

Laporan Triwulan IV Bulan Oktober-Januari Tanggal 1-10

| LKPM TRIWULAN IV | | | |
|------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| | Tambahan Realisasi (Rp) | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan |
| PMA | - | - | - |
| PMD | Rp. 32.665.357.419 | 192 | 27 |
| Total | Rp. 32.665.357.419 | 192 | 27 |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Triwulan IV dari 13 Perusahaan
- Jumlah tambahan Realisasi Investasi
- Total realisasi investasi
 - Rp. 32.665.357.419
- Melaporkan melalui system OSS-RBA



Laporan Semester I Bulan Juli Tanggal 1-10

| Semester I | | | |
|--------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | Tambahan Realisasi (Rp) | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan |
| PMA | - | | |
| PMD | Rp.36.618.510.000 | 278 | 149 |
| TOTAL | Rp.36.618.510.000 | | |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Semester I (Pertama) dari Kurang Lebih 90 Perusahaan
- Dari jumlah pelaporan 149 Laporan per Kbli
- Akumulasi Modal Kerja
 - Rp 17.682.858.356 dan Akumulasi Modal Tetap Rp. 36.618.510.000
- Melaporkan melalui system OSS - RBA

Laporan Semester II Bulan Januari Tanggal 1-10

| Semester II | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------|----------------|
| Tambahkan Realisasi (Rp) | | Tenaga Kerja | Jumlah Laporan |
| PMA | - | | |
| PMD | Rp. 42.221.668,900 | 308 | 106 |
| TOTAL | Rp. 42.221.668,900 | | |

- Laporan kegiatan penanaman modal di Semester II (Pertama) dari Kurang Lebih 61 Perusahaan

Dari jumlah pelaporan 106 Laporan per Kbli

Akumulasi Modal Kerja

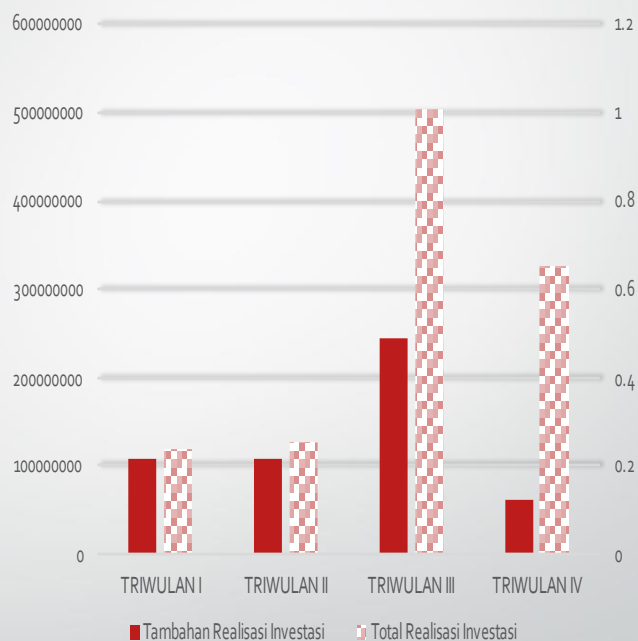
- Rp 14.653.999.010 dan Akumulasi Modal Tetap Rp. 27.567.669.890 Melaporkan melalui system OSS - RBA



Total REALISASI INVESTASI Dari
 Triwulan I 11.910.000.000
 Triwulan II 12.683.725.915
 Triwulan III 50.424.094.565
 Triwulan IV Rp. 32.665.357.419
 Akumulasi Dari Tw I – Tw III =
 Rp.107.683.177.899
 Untuk Per Semester
 Semester I 36.618.510.000
 Semester II 42.221.668.900

Total keseluruhan
 Rp. 186.523.356.799

LKPM 2022



MEMBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

Berikut ini Data Laporan Hasil Nilai Realisasi Investasi berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 10 : Data Laporan Nilai Realisasi Investasi LKPM Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

| JUMLAH NILAI INVESTASI DARI TAHUN KE TAHUN | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| NO. | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
| 1 | Nilai Investasi | 517.654.000.000 | 99.289.000.000 | 79.507.530.000 | 186.523.356.799 |

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Data Pertumbuhan nilai investasi berdasarkan LKPM dari Perusahaan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 menunjukkan adanya Penurunan target capaian ini dikarenakan karena adanya pandemic Covid 19 di Indonesia sedangkan untuk tahun 2020 ke 2021 menunjukkan sama dengan tahun sebelumnya karena masih dalam pemulihan ekonomi karena adanya pandemic covid 19 tersebut sedangkan untuk tahun 2021 ke tahun 2022 itu adanya peningkatan capaian target dan berhasil melampau target yang sudah ditetapkan.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Realisasi Investasi Daerah PMDN adalah sebagai berikut :

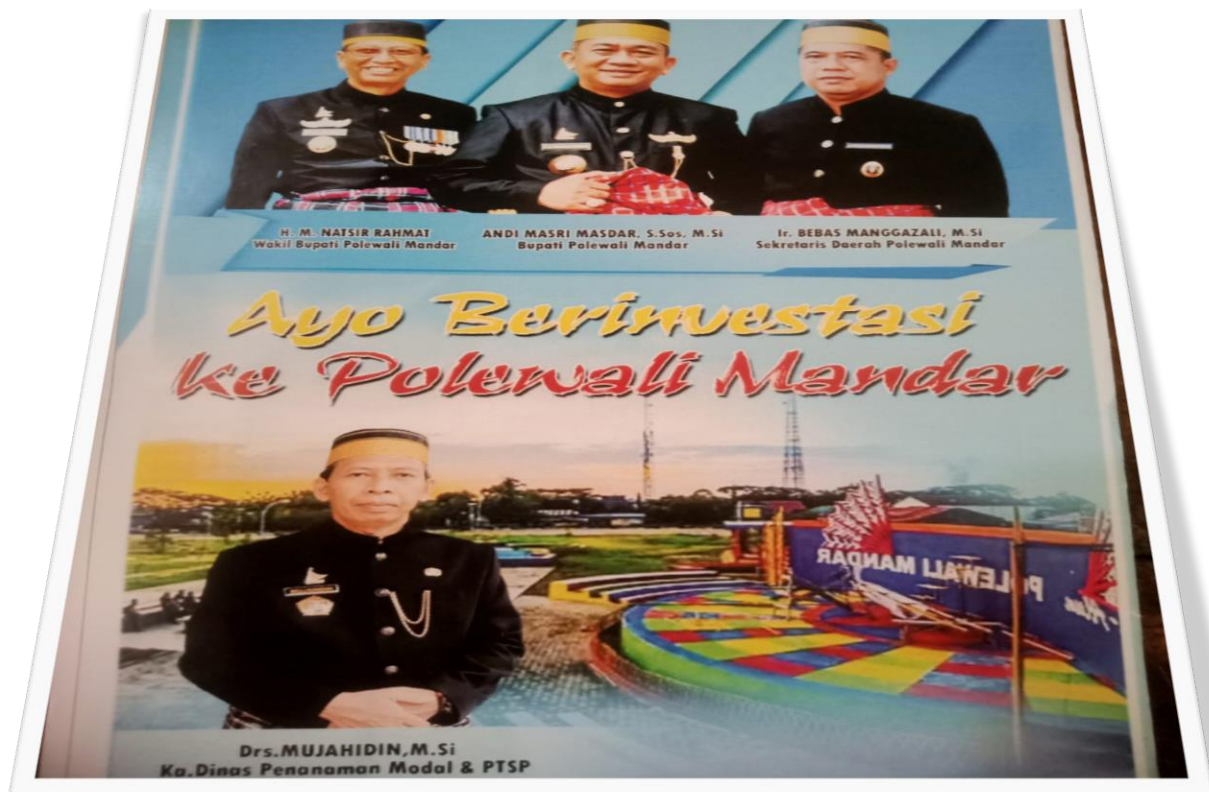
Tabel 11 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Sasaran Nilai Investasi Tahun 2022

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET | REALISASI | % |
|-----------|--|-------------|-------------|-------|
| | | Rp. | Rp. | |
| I | PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL | | | |
| 1 | KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | <i>Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i> | 204,118,200 | 203,571,400 | 99.73 |
| II | PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | | | |
| 1 | KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| 1 | <i>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal</i> | 257,773,500 | 214,860,400 | 83.35 |
| 2 | <i>Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal</i> | 121,401,500 | 105,036,800 | 86.52 |

Kegiatan di bidang Penanaman Modal pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembinaan kepada Para Pelaku Usaha yang diselenggarakan Tahun 2022

- Bimtek / Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Tata Cara Pengisian LKPM secara Online melalui Aplikasi OSS RBA.
- Forum Rapat Fasilitasi Permasalahan dan Hambatan Penanaman Modal
- Kegiatan Sosialisasi Pendampingan Tata Cara Pengisian LKPM secara Online melalui Aplikasi OSS RBA bagi Para Pelaku Usaha.
- Sosialisasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) dan Konsultasi Publik Penyusunan SP dan SOP Tahun Anggaran 2022



**DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN SOSIALISASI TAHUN 2022 YANG
DISELENGGARAKAN OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- 1. Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Tata cara pengisian LKPM secara Online melalui Aplikasi OSS RBA Kamis, 2 Juli 2022**



2. Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Tata cara pengisian LKPM secara Online melalui Aplikasi OSS RBA, Hari Jumat, 3 Juli 2022



3. Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko dan Tata cara pengisian LKPM secara Online melalui Aplikasi OSS RBA Rabu, 28 September 2022



4. Dokumentasi Foto Kegiatan Sosialisasi Pembimbingan Pendampingan Pengisian LKPM bagi Para Pelaku.



2. Kegiatan Pengawasan kepada Para Pelaku Usaha / Perusahaan yang diselenggarakan Tahun 2022



3. Mengikuti Kegiatan Pameran APKASI di Jakarta dan Pameran Polman Expo yang diselenggarakan Tahun 2022

1. PAMERAN APKASI DI JAKARTA



2. PAMERAN POLMAN EXPO HUT POLMAN



4. Mengikuti Rapat Koordinasi Investasi Penanaman Modal di Tingkat Provinsi dan Pusat yang diselenggarakan Tahun 2022



5. Menerbitkan Buku PROFIL INVESTASI DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR



ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

indikator kinerja nilai realisasi investasi sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bidang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari **Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Sektor Urusan Penanaman Modal**. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Nilai Investasi Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 12

**Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Kinerja
Nilai Investasi
Tahun 2022**

| No. | Sasaran Strategis/Kinerja Utama pada Anggaran Program | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Anggaran | Persentase |
|-----|---|---------------------|--------------------|------------|
| 1 | Promosi Penanaman Modal | 288,482,300 | 287,897,500 | 99,80 |
| 2 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 379,175,000 | 319,897,200 | 84.37 |

ANALISIS KEBERHASILAN , KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Nilai Investasi** telah dapat melampau target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2022, **Secara**

Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut adalah :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Langsung terhadap para pelaku Usaha atau perusahaan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.
2. Melakukan Pendampingan bagi para pelaku usaha atau perusahaan dalam pelaporan Online LKPM.

3. Mengikuti Kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal dalam upaya Mempromosikan Data Potensi Investasi Daerah.

Namun ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian peningkatan LKPM yang dihadapi yaitu :



Jadi dalam menghadapi kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaporan

LKPM, ini diperlukan sebuah **solusi** yaitu :

1. Lebih Meningkatkan selalu SDM aparatur Penanaman Modal dan PTSP dalam mengikuti Pendidikan dan Pelatihan OSS RBA dan LKPM.
2. Lebih meningkatkan Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Para P[elaku Usaha atau Perusahaan dalam meningkatkan Laporan Kegiatan Penanaman Modalnya melalui Pelaporan OSS RBA

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Indikator Kinerja Sasaran Nilai Investasi sangat didukung oleh Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan di Bidang Penanaman Modal. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Nilai Investasi sebagai berikut :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

**ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI INVESTASI TAHUN 2022**

| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|-----------|
| Kepala Bidang Penanaman Modal | Membaiknya iklim investasi daerah | 1 Nilai Investasi | 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal | 118,450,000,000 | 186,523,356,799 | 157% |
| | | 2 Jumlah Investor | | 570 | 2793 | 100% |
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal | 1 Jumlah pelaksana kegiatan BirteK LKPM Online dan Sosialisasi Kemitraan Usaha PMDN/UMKM | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 191 Perusahaan | 191 Perusahaan | 100% |
| | | 2 Jumlah pelaksana pengawasan penanaman modal | | 12 Perusahaan | 358 Perusahaan | 100% |
| Analisis Kebijakan Ahli Muda | Meningkatnya jumlah promosi penanaman modal | 1 Jumlah Event Pameran yang diikuti | Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 2 Event | 2 Event | 100% |

Tabel 13 :

Sasaran Strategis

Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks kepuasan pengguna pelayanan



Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting

seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat

dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

Adapun Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Yaitu :

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

- Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
4. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Ada tahapan dalam Menyusun survei indeks kepuasan masyarakat , yaitu :

| TAHAPAN PENYUSUNAN SURVEI IKM | |
|-------------------------------|--|
| 1 | Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat |
| 2 | Hasil Pengolahan Data IKM |
| 3 | Analisis Hasil SKM |

TAHAPAN 1

Pengumpulan Data Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan pada pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu.

Metode Pengumpulan Data Pelaksanaan SKM menggunakan iPad kepada pengguna layanan yang terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu yaitu :

- Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- Biaya/ tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
- Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Populasi seluruh masyarakat yang mengurus Perizinan sebanyak 133 Masyarakat yang mengurus Izin di DPMPSTSP yang di jadikan Sample sebanyak 97 Responden

1. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di loket penyerahan izin pada ruang pelayanan DPMPSTSP pada waktu jam layanan sedang berlangsung atau jam kerja layanan

2. Waktu Pelaksanaan SKM

Berdasarkan jadwal yang ditentukan, survey kepuasan masyarakat dilaksanakan mulai tanggal 21 Oktober sampai dengan 9 Desember 2022 di Kantor DPMPSTSP Kabupaten Polewali Mandar dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Kegiatan | Waktu Pelaksanaan | Lama Waktu |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Persiapan | Oktober 2022 | 2 Hari |
| 2 | Pengumpulan data | Oktober-Desember 2022 | 3 Bulan |
| 3 | Pengolahan Data dan analisis Hasil | Desember 2022 | 2 Hari |
| 4 | Penyusunan dan Pelaporan Hasil | Desember 2022 | 2 Hari |

3. Penentuan Jumlah Responden

Jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabeljDalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan (jumlah pemohon) dari seluruh jenis pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan periode survei sebelumnya. Jika dilihat dari perkiraan jumlah penerima layanan tahun 2022, maka populasi penerima layanan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu pintu adalah sebanyak 85 orang. Selanjutnya responden dipilih secara acak sebanyak 70 dari setiap jenis pelayanan besaran sampel dan populasi menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan.

| Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) | Populasi (N) | Sampel (n) |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 10 | 10 | 220 | 140 | 1200 | 291 |
| 15 | 14 | 230 | 144 | 1300 | 297 |
| 20 | 19 | 240 | 148 | 1400 | 302 |
| 25 | 24 | 250 | 152 | 1500 | 306 |
| 30 | 28 | 260 | 155 | 1600 | 310 |
| 35 | 32 | 270 | 159 | 1700 | 313 |
| 40 | 36 | 280 | 162 | 1800 | 317 |
| 45 | 40 | 290 | 165 | 1900 | 320 |
| 50 | 44 | 300 | 169 | 2000 | 322 |
| 55 | 48 | 320 | 175 | 2200 | 327 |
| 60 | 52 | 340 | 181 | 2400 | 331 |
| 65 | 56 | 360 | 186 | 2600 | 335 |
| 70 | 59 | 380 | 191 | 2800 | 338 |
| 75 | 63 | 400 | 196 | 3000 | 341 |
| 80 | 66 | 420 | 201 | 3500 | 346 |
| 85 | 70 | 440 | 205 | 4000 | 351 |
| 90 | 73 | 460 | 210 | 4500 | 354 |
| 95 | 76 | 480 | 214 | 5000 | 357 |
| 100 | 80 | 500 | 217 | 6000 | 361 |
| 110 | 86 | 550 | 226 | 7000 | 364 |
| 120 | 92 | 600 | 234 | 8000 | 367 |
| 130 | 97 | 650 | 242 | 9000 | 368 |

TAHAPAN 2

Hasil Pengolahan Data Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu **130** orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

| No | KARAKTERISTIK | INDIKATOR | JUMLAH | PERSENTASE |
|----|---------------|-------------|--------|------------|
| 1 | JENIS KELAMIN | LAKI | 53 | 40% |
| | | PEREMPUAN | 80 | 60% |
| 2 | PENDIDIKAN | SD KE BAWAH | 0 | 0% |
| | | SLTA | 4 | 3% |
| | | DIII | 0 | 0% |
| | | SI | 126 | 95% |
| | | S2 | 3 | 2% |
| 3 | PEKERJAAN | PNS | 32 | 25% |
| | | SWASTA | 5 | 4% |
| | | WIRUSAHA | 2 | 1% |
| | | LAINNYA | 94 | 70% |
| 4 | JENIS LAYANAN | LAYANAN A | 55 | 42% |
| | | LAYANAN B | 78 | 58% |

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (Unit Layanan dan Per Unsur Layanan
 Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh
 hasil sebagai berikut :

| | Nilai Unsur Pelayanan | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| IKM per unsur | 3,89 | 3,88 | 3,85 | 3,88 | 3,88 | 3,89 | 3,89 | 3,80 | 3,90 |
| Kategori | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| IKM Unit Layanan | 97.6 (A atau Sangat Baik) | | | | | | | | |

LAMPIRAN

HASIL KUESIONER PENGOLAHAN DATA SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Tanggal Survei :

Jam Survei :

08.00 - 12.00*

13.00 - 15.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : L P Usia : Tahun

Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3

Pekerjaan : SWASTA WIRAUUSAHA LAINNYA (sebutkan)

Asal Pelanggan : PERORANGAN PERUSAHAAN PENGURUS

Jenis Layanan yang diterima :

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

| | | | |
|---|------|--|------|
| 1. Apakah Saudara dapat memahami persyaratan pelayanan yang tersedia di PTSP KKP | P *) | 6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan | P *) |
| a. Tidak dipahami | 1 | a. Tidak Kompeten | 1 |
| b. Kurang dipahami | 2 | b. Kurang Kompeten | 2 |
| c. Dipahami | 3 | c. Kompeten | 3 |
| d. Sangat dipahami | 4 | d. Sangat Kompeten | 4 |
| 2. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di PTSP KKP | | 6. bagaimana Pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan | |
| a. Tidak Mudah | 1 | a. Tidak Sopan dan Ramah | 1 |
| b. Kurang Mudah | 2 | b. Kurang Sopan dan Ramah | 2 |
| c. Mudah | 3 | c. Sopan dan Ramah | 3 |
| d. Sangat Mudah | 4 | d. Sangat Sopan dan Ramah | 4 |
| 3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan | | 8. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana | |
| a. Tidak Cepat | 1 | a. Buruk | 1 |
| b. Kurang Cepat | 2 | b. Cukup | 2 |
| c. Cepat | 3 | c. Baik | 3 |
| d. Sangat Cepat | 4 | d. Sangat Baik | 4 |
| 4. Apakah produk hasil perizinan yang diterbitkan telah memenuhi ketepatan mutu pelayanan yang dijanjikan | | 9. Bagaimana pendapat Saudara tentang fasilitas penanganan pengaduan pengguna layanan | |
| a. Tidak Memenuhi | 1 | a. Tidak Tersedia | 1 |
| b. Kurang Memenuhi | 2 | b. Ada tetapi tidak berfungsi | 2 |
| c. Memenuhi | 3 | c. Berfungsi kurang maksimal | 3 |
| d. Sangat Memenuhi | 4 | d. Dikelola dengan baik | 4 |
| 5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan | | Saran Perbaikan | |
| a. Sangat Mahal | 1 | | |
| b. Cukup Mahal | 2 | | |
| c. Murah | 3 | | |
| d. Gratis | 4 | | |

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
 ALAMAT : Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315
 Tlp/Fax. : -

| NO. RESP | NILAI UNSUR PELAYANAN | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 38 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 49 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 53 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 56 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 57 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 58 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 59 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 61 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 63 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 64 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 67 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 68 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 73 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 75 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 77 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 78 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 80 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 81 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 82 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 84 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 88 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 89 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 90 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 91 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 92 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 93 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 94 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 95 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 97 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 98 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 99 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 101 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 102 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 103 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 104 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 105 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 107 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 108 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 109 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 110 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 111 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 112 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 114 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 115 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 116 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 117 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 119 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 120 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 121 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 122 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 124 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 126 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 127 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 128 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 130 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 131 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 132 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| /Unsur | 523 | 522 | 501 | 522 | 522 | 523 | 523 | 506 | 529 |
| NRR / Unsur | 3.93 | 3.92 | 3.77 | 3.92 | 3.92 | 3.93 | 3.93 | 3.80 | 3.98 |
| NRR tertbg/ unsur | 0.437 | 0.436 | 0.419 | 0.436 | 0.436 | 0.437 | 0.437 | 0.423 | 0.442 |
| IKM Unit pelayanan | | | | | | | | | 3.90 |
| IKM Unit pelayanan | | | | | | | | | 97.6 |

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai rata-rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR Per Unsur = Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi

NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11

per unsur

IKM UNIT PELAYANAN : 97.6

Mutu Pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31-100,00
- B (Baik) : 76,61-88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00-76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

| No. | UNSUR PELAYANAN | NILAI RATA-RATA |
|-----|---|-----------------|
| U1 | Persyaratan | 3.89 |
| U2 | Sistim, Mekanisme dan Prosedur | 3.88 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 3.85 |
| U4 | Biaya/Tarif | 3.88 |
| U5 | Produk Spesifikasi jenis pelayanan | 3.88 |
| U6 | Kompetensi pelaksana | 3.89 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3.89 |
| U8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3.80 |
| U9 | Sarana dan Prasarana | 3.90 |

- Dokumentasi Pengisian SKM



TAHAPAN 3

Analisis Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Analisis Permasalahan / Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan Pada umumnya setiap unsur dari 9 layanan yang disurvei menunjukkan nilai A (Sangat Baik), hanya saja masih ada 5 Unsur yang perlu ditingkatkan seperti Sistem Mekanisme dan Prusedur, Waktu Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Layanan , Penganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan sarana dan prasarana Rencana Tindak Lanjut dari 5 unsur yang perlu tingkatan, 2 unsur yang diprioritaskan untuk di tindak lanjuti, hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Dibuatkan rencana tindak lanjut perbaikan.

Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya sebagai berikut :

| No. | Prioritas Unsur | Program / Kegiatan | Waktu | | | | Penanggung Jawab |
|-----|--------------------|--|---------|--------------------|---|----------|---------------------|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | |
| | | | 1 | Waktu Penyelesaian | Peningkatan sosialisasi registrasi "online" | | |
| 2 | Prosedur Pelayanan | Lakukan monitoring dan evaluasit terhadap prosedur pelayanan | | | | √ | ... |

Tren Nilai Survei IKM Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP dapat dilihat melalui Tabel berikut :

| Tren Kinerja Pelayanan | | |
|------------------------|-------|-----------|
| NO. | TAHUN | NILAI IKM |
| 1 | 2019 | 84,4 |
| 2 | 2020 | 85.36 |
| 3 | 2021 | 96.96 |
| 3 | 2022 | 97.6 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

NILAI IKM TAHUN 2022 :

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) : 97,6

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berdasarkan Data hasil Pengolahan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada table dibawah ini :

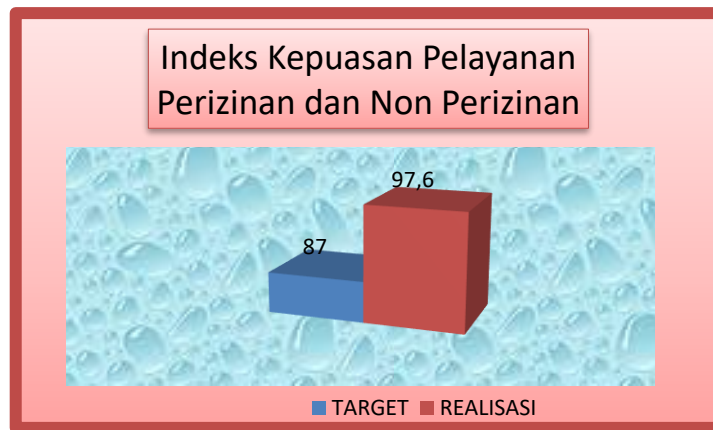
Tabel 14 : Data hasil Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Periode Tahun 2022

| NO. | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | REALISASI | % |
|-----|--|----------|------------------------|------------------------|-----|
| 1 | Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Predikat | Sangat Baik (Rating A) | Sangat Baik (Rating A) | 100 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan telah melampaui target yang telah ditetapkan. Dimana Target Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Predikat Sangat Baik dapat tercapai di Tahun 2022 dengan Predikat Sangat Baik atau Rating A ,

Nilai Indeks capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mencapai Nilai 97.6 atau Predikat Sangat Baik.

Gambar 3: Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022



Berdasarkan gambar diatas target indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sudah dapat tercapai bahkan melampau target yang dicanangkan, pencapaian indikator ini juga terealisasi berkat adanya dukungan Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan dengan dukungan kegiatan yaitu Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota dan dengan Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan. Dimana dari Sub Kegiatan tersebut menghasilkan adanya peningkatan Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

MEMBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

Berikut ini Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

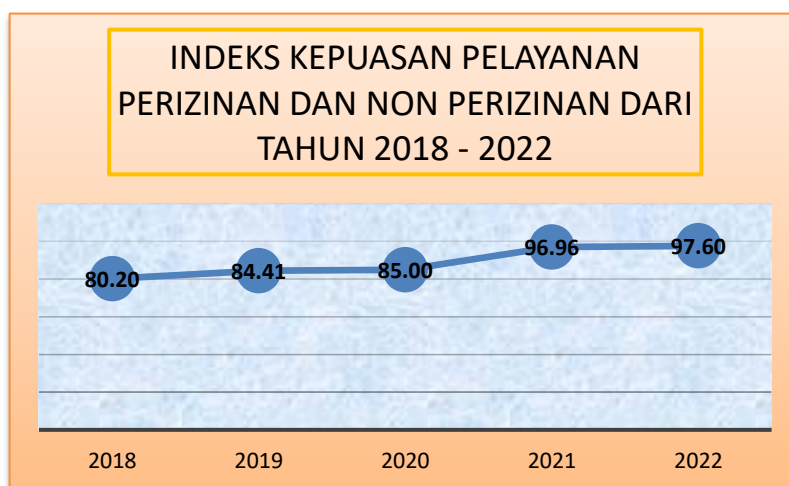
Tabel 15 : Data Laporan Hasil Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Indeks Pengguna pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022

| NO. | URAIAN | IKM PER PRIODE WAKTU (TAHUN) | | | | |
|-----|--|------------------------------|--------|------|--------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan Hasil Pengolahan IKM per Priode Waktu | 80,20% | 84,41% | 85% | 96,96% | 97.6% |

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Data Pertumbuhan hasil pengolahan IKM dari Tahun ke Tahun menunjukkan adanya peningkatan persentase, dimana hal ini pencapaian indikator ini juga terealisasi berkat adanya dukungan Program dan Kegiatan yang diikuti dan dilaksanakan.

Adapun Perbandingan capaian kinerja antara target dan realisasi dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 untuk Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat dilihat dari diagram garis dibawah ini.

Gambar 4 : Diagram Garis Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Indeks Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022



Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai berikut :

Tabel 16 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | TARGET | REALISASI | % |
|----------|---|-------------|-------------|-------|
| | | Rp. | Rp. | |
| I | PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL | | | |
| 1 | KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | | | |
| 1 | Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 100,180,100 | 100,151,600 | 99.97 |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan. Adapun kegiatan yang menunjang indikator kinerja tersebut yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Dimana dari kegiatan tersebut menghasilkan adanya peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Hal ini dapat memacu persaingan yang positif antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Kab. Polewali Mandar dalam upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

ANALISIS KEBERHASILAN , KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2022, **Secara Analisis Keberhasilan** dalam pencapaian target tersebut adalah:

1. :Pelaksanaan Pengukuran kepuasan masyarakat melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sudah sesuai dengan mekanisme penerapan pelayanan public.
2. Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Pelayanan Prima terhadap para pengguna pelayanan.

Namun ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kurangnya SDM Petugas Aparatur Pelayanan Perizinan dalam peningkatan pelayanan perizinan.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan perizina

Jadi dalam menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan ini diperlukan sebuah

solusi yaitu :

1. Lebih meningkatkan pengembangan SDM aparatur pelayanan perizinan melalui kegiatan Pendidikan pelatihan dan mengikuti sosialisasi dan study banding.
2. Lebih menambah sarana dan prasarana layanan perizinan.

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar untuk indicator kinerja **Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan** menargetkan Predikat Sangat Baik (Nilai A) dengan Nilap persentase IKM. Sebesar 96,96 %, Target tersebut dapat dicapai sesuai target dan melebihi target yaitu nilai IKM tahun 2022 sebesar 97,6 % sehingga capaian kinerja untuk indikator ini mencapai Predikat Sangat Baik (Nilai A) dengan persentase capaian 100 persen.

Dengan demikian realisasi target **INDEKS PELAYANAN PENGGUNA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN** dapat mencapai target dan sekaligus melampau capaian tersebut dengan demikian target indikator ini dikategorikan

BERHASIL.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Sektor Urusan Perizinan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 17

ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN PADA INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Anggaran | Persentase |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 174,882,600 | 174,843,300 | 99.98 |

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

indikator kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja pada Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 18

ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN PENGGUNA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TAHUN 2022

| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---|---|---|--|-----------|-----------|-----------|
| Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 1. Program Pelayanan Penanaman Modal | 100% | 92% | 92% |
| Analisi Kebijakan Ahli Muda | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diJumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Elektronik | Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis SPenyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| Analisi Kebijakan Ahli Muda | Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | Jumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diJumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Elektronik | Program Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis SPenyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |

DOKUMEN DATA KEGIATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

LAPORAN IZIN YANG DITERBITKAN TAHUN 2022



Sebagai gambaran capaian kinerja Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar pada Lingkup Bidang Perizinan maka data jumlah izin yang diterbitkan atau di tindaklanjuti Tahun 2016 sampai Tahun 2022 dapat ditampilkan pada tabel dan diagram batang dibawah ini :

Tabel 19 : Jenis dan Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 s/d Tahun 2022.

| No | Jenis Izin | Tahun | | | | | | |
|----|------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | IGTU | 482 | 429 | 422 | 242 | - | - | - |
| 2 | IUJK | 92 | 42 | 32 | 59 | 46 | 3 | - |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 3 | SIUP | 479 | 421 | 422 | 328 | 473 | 370 | 2000 |
| 4 | TDP | 464 | 421 | 405 | 58 | - | - | - |
| 5 | SIUI | 32 | 28 | 19 | 10 | 5 | 5 | 740 |
| 6 | TDG | 2 | 1 | 15 | 10 | 7 | 16 | 1 |
| 7 | IMB | 1281 | 1602 | 1683 | 1205 | 1035 | 1009 | 321 |
| 8 | Izin Pelataran | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 9 | Izin Reklame | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 10 | I. Trayek (Karwas)) | 126 | 40 | 26 | 3 | - | - | - |
| 11 | SIUSP/TDUP | 11 | 5 | 18 | - | - | 14 | - |
| 12 | Izin Praktek Dokter | 22 | 82 | 89 | 68 | 67 | 138 | 150 |
| 13 | Izin Praktek Dokter Gigi | - | - | - | 16 | 12 | - | 3 |
| 14 | Izin Praktek Dokter Spesialis | - | - | - | 15 | 16 | - | - |
| 15 | Izin Praktek Bidan | 14 | 67 | 415 | 126 | 109 | 307 | 305 |
| 16 | Izin Praktek Perawat | 2 | 116 | 430 | 154 | 114 | 175 | 343 |
| 17 | Izin Usaha Sarana Pariwisata | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Izin Apotik | 14 | 22 | 12 | 16 | 19 | 23 | 24 |
| 19 | Izin Toko Obat | 0 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Izin Pendirian Apoteker | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | TDU/Penggilingan Padi | 12 | 20 | 6 | 8 | 2 | 1 | - |
| 22 | Izin Penelitian | 729 | 651 | 733 | 1142 | 379 | 896 | 821 |
| 23 | Izin Prinsip | 10 | 18 | 28 | - | - | - | - |
| 24 | Izin Lokasi | 4 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | - |
| 25 | Izin Lingkungan | 3 | 21 | 16 | 22 | 7 | 3 | - |
| 26 | IUSP | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 27 | Izin Operasional PAUD/TK | - | 3 | 102 | 118 | 14 | - | - |
| 28 | Izin Operasional .PKBM,TBM & LKP | - | 2 | 14 | 12 | 7 | - | - |
| 29 | Izin Pendirian Klinik | 2 | 77 | 2 | 3 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
| 30 | Izin Mendirikan Rumah Sakit | 2 | 27 | 0 | - | - | - | - |
| 31 | Izin Terapis Gigi & Mulut | - | 6 | 3 | 4 | 9 | - | 2 |
| 32 | SIP – ATML | - | 8 | 20 | 7 | 7 | 23 | 11 |
| 33 | Izin Kerja Tehnis Farmasi | - | 2 | 8 | 7 | 4 | 26 | 23 |
| 34 | Izin Optik | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 35 | Izin K. REFRAKSIONIS OPTISIEN/OPTOMETRIS | - | - | 1 | 2 | - | - | 1 |
| 36 | Izin Praktik Tenaga Giizi | - | - | 4 | 3 | - | 3 | 9 |
| 37 | I. Praktek Radiografer | - | - | 6 | 6 | - | 4 | 6 |
| 38 | Izin Operasional. SD DAN SMP | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 39 | Izin Apoteker | - | - | 33 | 30 | 30 | 68 | 41 |
| 40 | Izin Operasional Klinik | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 |
| 41 | Izin Penyelenggaraan Puskesmas | - | - | 9 | 9 | 1 | - | 1 |
| 42 | TDI | - | - | - | 21 | - | 2 | - |
| 43 | Izin Laboratorium Klinik | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 44 | Izin Praktik Fisioterafis | - | - | - | 3 | - | 3 | 7 |
| 45 | Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisatawan | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 46 | Tanda Daftar Usaha Jasa Makan Minum | - | - | - | 5 | 5 | - | - |
| 47 | Tanda Daftar Penyediaan Akomodasi | - | - | - | 3 | 4 | - | - |
| 48 | Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 49 | Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) | - | - | - | - | 7 | - | 4 |
| 50 | Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
| 51 | Izin Usaha Industri Rumah Tangga Pangan | - | - | - | - | 29 | - | - |
| 52 | Izin Pendirian Puskemas | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 53 | Izin Toko Alat Kesehatan | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 54 | Tanda Daftar Usaha Perjalanan Pariwisata | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 55 | Surat Pencabutan Izin Apoteker | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 56 | Izin Praktik Elektromedis | - | - | - | - | - | 2 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 57 | Izin Paraktik Tenaga Kesehatan Tradisional | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 58 | Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga | - | - | - | - | - | 45 | - |
| 59 | Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 60 | Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 61 | izin koperasi simpan pinjam | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 62 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD, | - | - | - | - | - | 79 | 122 |
| 63 | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal | - | - | - | - | - | 7 | 1 |
| 64 | Izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Non Formal | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 65 | Izin Kerja Ortotis Protesis | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 66 | Izin Praktik Penata Anestesi | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 67 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 68 | Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 69 | Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| JUMLAH | | 3,794 | 4,124 | 4,990 | 3,738 | 2,424 | 3,234 | 4,973 |

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2022

Untuk mewujudkan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang berkualitas sangat didukung oleh adanya Standar dan Prosedur perizinan yang memadai sehingga kan memberikan

. Pelayanan Perizinan di Tahun 2022 memiliki inovasi kegiatan yang sangat membantu masyarakat umum dalam mempercepat pengurusan izin. Hal ini dapat dilihat dari inovasi kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

INOVASI PERANGKAT DAERAH DAN PENGHARGAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2021

| No. | Jenis Inovasi | Gambaran Singkat Tentang Inovasi (Dasar pelaksanaan, Tujuan, Manfaat dsb.) |
|-----|---|---|
| 1 | <p>Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena (MPP AIM)</p>   |  <p>Guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) dalam hal perizinan. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) meluncurkan suatu inovasi yang memudahkan masyarakat. Hadirnya Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena (MPPAIM) di Kabupaten Polman.</p> <p>Inovasi kehadiran Mall Pelayanan Publik Anjungan Izin Masagena ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas kantor dengan melakukan rehabilitasi sehingga DPMPSTP kemudian dapat memberikan pelayanan dengan sarana dan prasarana seperti saat ini.</p> <p>Dengan adanya MPP AIM dalam pelaksanaannya untuk kualitas pelayanan publik sebagai salah satu wujud komitmen dan kesungguhan pemerintah daerah dalam mewujudkan visi Polewali Mandar maju sejahtera merupakan wujud kerja kita bersama.</p> <p>Kehadiran MPP AIM Ini juga merupakan kerja kolaboratif dan terintegrasi untuk kemudahan, kecepatan dan kepastian pelayanan bagi masyarakat.</p> <p>Dengan pengembangan layanan teknologi informasi melalui pemanfaatan Aplikasi OSS, MASIGA dan si CANTIK serta LAPOR yang mendukung Optimalnya pelayanan pada MPP AIM ini serta Memudahkan Masyarakat dalam mengurus Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal</p> |

LAYANAN TASPEN DI MPP AIM



KEGIATAN PENINJAUAN PERIZINAN TAHUN 2022

Untuk meningkatkan pengawasan izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar serta berdasarkan SOP dan SP maka didalam pelaksanaannya itu telah melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang dianggap bermasalah dan tidak memiliki izin.



Untuk mewujudkan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin maka sangat diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan izin pada masyarakat. Maksud dari adanya Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah untuk mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, cepat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Tujuan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan kegiatan perizinan dan non perizinan adalah untuk :

- a. Mengetahui data dan informasi sejauh mana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memiliki perizinan pada saat melaksanakan setiap kegiatan investasi dilapangan.
- b. Memperoleh data dan informasi kesesuaian antara perencanaan, permohonan izin yang diajukan dengan pelaksana dilapangan.
- c. Membantu pemecahan masalah secara terpadu dalam menyelesaikan setiap mudah dan hambatan dilapangan.

Dalam memberikan upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin yang diterbitkan, maka tata cara dalam memberikan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perizinan dan non perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi dan pemilahan data dan berkas permohonan izin yang akan menjadi objek pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan.
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian melalui inspeksi kelengkapan guna melakukan pendataan pelanggaran dari potensi obyek perizinan dilapangan secara berkala.
- c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh pengusaha dan masyarakat.
- d. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksana investasi oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dari perizina dan non perizinan.

Dari hasil pengawasan dan pengendalian ini akan memberikan dampak bagi peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan izin dan non izin sehingga dapat memberikan hasil laporan cakupan kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan izin dan non izin yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Predikat SAKIP perangkat daerah



Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah terdapat Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Predikat SAKIP Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun ke Tahun yang Evaluasi lewat Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD dari Inspektorat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 09 Tahun 2013

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil evaluasi Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, itu memuat Aspek komponen yang dinilai adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Internal
5. Capaian Kinerja

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Berikut ini Data Evaluasi SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang rincian berdasarkan REVIU Penilaian LAKIP DPMPTSP dari Inspektorat untuk Penilaian LAKIP Tahun 2021 serta Adapun Metode Perhitungan Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diketahui dari **Bobot dan Nilai Yang dihasilkan oleh Komponen SAKIP yang dinilai.** adalah sebagai berikut

Tabel 20 : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Berdasarkan Reviu Penilaian LAKIP dari Inspektorat di Tahun 2022.

| No. | Komponen yang dinilai | 2022 | |
|-----|-----------------------|-------|-------|
| | | Bobot | Nilai |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 28,55 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 22,19 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,58 |
| 4 | Evaluasi Internal | 10 | 5,41 |

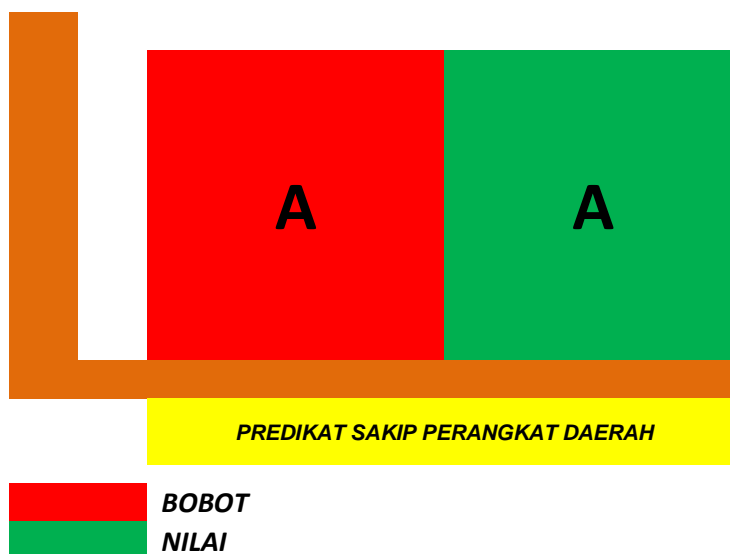
| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|--------------|
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 11,50 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 80,23 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu telah mencapai target dan capaian ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Adapun Kegiatan yang mendukung indicator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah yaitu Kegiatan Penyusunan RENJA/Perubahan Renja Perangkat Daerah, Kegiatan Penyusunan RKA-DPA/RPKA-DPPA dan Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja.

Gambar 5 : Diagram Batang Perbandingan Antara Bobot dan Nilai pada Indikator Kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah Pada Dinas PMPTSP Tahun 2022.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022



Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Predikat SAKIP Perangkat Daerah A. Target tersebut dapat dicapai sesuai target pada tahun 2022. Ini menandakan adanya capaian target yang dicapai sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

MEMBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk Data capaian predikat SAKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2017 s/d Tahun 2022 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

Tabel 21 : Data Indikator Predikat SAKIP Perangkat Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2022

| No. | Komponen yang dinilai | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-----|--------------------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai | Bobot | Nilai |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30 | 28,20 | 30 | 29,40 | 30 | 29,40 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 25 | 23,75 | 25 | 22,19 | 25 | 22,82 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15 | 12,27 | 15 | 12,13 | 15 | 12,31 |
| 4 | Evaluasi Internal | 10 | 3,45 | 10 | 5,20 | 10 | 5,38 |
| 5 | Capaian Kinerja | 20 | 12,50 | 20 | 13,00 | 20 | 13,96 |
| | Nilai Hasil Evaluasi | 100 | 80,77 | 100 | 81,92 | 100 | 83,87 |
| | Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | A | | A | | A |

Berdasarkan table diatas, Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang meningkat persentasenya dari tahun ke tahun sehingga hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP ini dapat memberikan penerapan manajemen kinerja yang terukur dan terencana sesuai target yang di inginkan.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

Tabel 22 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas PMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|-----|--|------------------|------------------|--------------------|
| | | Rp. | Rp. | % |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | |
| | Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,820,700 | 7,820,700 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2,843,300 | 2,843,300 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,540,800 | 3,540,800 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1,436,600 | 1,436,600 | 100.00 |

ANALISIS KEBERHASILAN , KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Predikat SAKIP**

Perangkat Daerah telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2022, **Secara Analisis Keberhasilan** dalam pencapaian target tersebut adalah:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja (PK).
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) tingkat OPD hingga pejabat eselon IV.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau perkembangan kemajuan pencapaian kinerja.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Data target output dan outcome dalam pencapaian strategi dan tujuan serta sasaran program dan kegiatan

Dengan demikian realisasi target **PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indicator ini dikategorikan **BERHASIL**

Namun ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian Predikat SAKIP Perangkat Daerah yang dilaksanakan yaitu : Perlunya dilakukan Reviu Kinerja secara berjenjang mulai dari Level atas sampai Bawahan.

Jadi dalam menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan ini diperlukan sebuah **solusi** yaitu : Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengukuran Kinerja secara Berjenjang sehingga bisa diketahui sejauh mana capaian yang dilakukan.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bagian Sekretariat DPMPTSP. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 23

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN
PADA INDIKATOR PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH**

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Anggaran | Persentase Capaian |
|-----|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | Rp. | Rp. | % |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 7,820,700 | 7,820,700 | 100.00 |

**ANALISIS
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

indikator kinerja Predikat SAKIP Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Predikat SAKIP Perangkat Daerah Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 24

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|---|-----------|-----------|--------|
| PREDIKAT SAKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | | | | | | | |
| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Sekretaris | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | 1 | Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 | Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 | Persentase tertib keuangan perangkat daerah | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 98,28% | 98,28% |
| | | 4 | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 100% | 100% | 100% |
| Perencana Ahli Muda | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | Jumlah dokumen Renstra dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | 2 | Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok, DPA Revisi dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | 3 | Jumlah Laporan Monev Pembangunan dan LAKIP Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 25 ASN | 25 ASN | 98,28% |
| | | 2 | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | 3 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Manajemen Organisasi Perangkat Daerah terdapat Indikator Kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah. Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun ke Tahun lewat Laporan Hasil Evaluasi Laporan Keuangan OPD.



Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah adalah laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dan terukur. Jika laporan keuangan diberikan berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan. Faktor-faktor pendukung Indikator Kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dalam mencapai Indikator Sasaran 100% antara lain :

1. Komitmen Pimpinan untuk mecapai terwujudnya Pengelolaan Keuangan dengan melaksanakan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang.
2. Adanya kebijakan Akuntansi yang diterapkan secara berkesinambungan.
3. Adanya Rekonsiliasi Penatausahaan Keuangan yang dilaksanakan.

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Untuk pengelolaan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022, laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intrn dengan menyajikan informasi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP). Untuk Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar memuat 5 (lima) komponen utama yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
3. Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Berikut ini Data pencapaian Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar yang Data Tahun 2022 berdasarkan Metode Penyelesaian Laporan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dapat diketahui sebagai berikut

Tabel 25 : Data Indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja yang dinilai | 2022 | |
|-----|--|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi |
| 1 | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100% | 97,33% |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu hamper mencapai target dan capaian ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Opini Pengelolaan Keuangan yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang didukung oleh 3 Sub Kegiatan yaitu : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.

Gambar 6 : Diagram Batang Perbandingan Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah Pada Dinas PMPTSP Tahun 2022.



Pada Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sebesar 100 %. Target tersebut hampir dapat dicapai sesuai target pada tahun 2022 yaitu capaian sebesar 97,33 %

MEMBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk Data capaian Target Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2019 s/d Tahun 2022 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

Tabel 26 : Data Indikator Kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 s/d 2022

| No. | Indikator Kinerja | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|-----|--|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1 | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100% | 99,86 | 100% | 99,93 | 100% | 98,38 | 100% | 97,33 |

Berdasarkan tabel diatas, Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang sama dengan tahun sebelumnya hamper mencapai 100, sehingga memberikan hasil pengelolaan keuangan yang tertib administrasi sesuai standard dan tepat waktu.

Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

Tabe 27 : Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas PMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | TARGET | REALISASI | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | | Rp. | Rp. | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | | | |
| 1 | KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,393,009,326 | 2,351,816,848 | 98.28 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2,389,315,426 | 2,348,122,948 | 98.28 |
| 2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 2,206,000 | 2,206,000 | 100.00 |
| 3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 1,487,900 | 1,487,900 | 100.00 |

Berdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 Program 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

ANALISIS KEBERHASILAN , KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah** telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2022, **Secara Analisis Keberhasilan** dalam pencapaian target tersebut adalah:

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah "100%". Dimana Target ini Realisasinya sampai akhir tahun 2022 mencapai Persentase "97,33" Sesuai dengan sistematika administrasi pengelolaan keuangan yang dilaksanakan, sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja hampir mencapai 100 persen. Adapun faktor yang sangat mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA), Laporan Monitoring dan Evaluasi Anggaran (Monev Anggaran), Laporan Aset Barang
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun 2022.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Evaluasi Internal untuk memantau Pegawai pencapaian Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan.

Dengan demikian realisasi target **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indikator ini dikategorikan **BERHASIL**

Namun ada beberapa hal yang menjadi yang menjadi permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan pencapaian Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah yang dilaksanakan yaitu : Perlunya dilakukan Reviu Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pengelolaan Keuangan secara internal.

Jadi dalam menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah ini diperlukan sebuah **solusi** yaitu : Melakukan secara rutin pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan yang sesuai standar dan Prosedur Pengelolaan Keuangan sehingga bisa diketahui sejauh mana capaian realisasi anggaran dan administrasi keuangan yang dilakukan.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

Indikator kinerja Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 28

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN
PADA INDIKATOR KINERJA PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH**

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran Tahun 2022 | Realisasi Anggaran | Persentase |
|-----|---|------------------------|-----------------------|------------|
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2,393,009,326 | 2,351,816,848 | 98.28 |

**ANALISIS
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

indikator kinerja **Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indikator Opini Pengelolaan Keuangan Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 29

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA | | | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|-----------|-----------|--------|
| PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 | | | | | | | |
| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Sekretaris | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | 1 | Persentase perencanaan perangkat daerah yang tersusun sesuai standar dan tepat waktu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 | Persentase pelaporan perangkat daerah sesuai standar dan tepat waktu | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 | Persentase tertib keuangan perangkat daerah | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 100% | 98,28% | 98,28% |
| | | 4 | Persentase penyampaian laporan keuangan sesuai standar dan tepat waktu | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 100% | 100% | 100% |
| Perencana Ahli Muda | Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | Jumlah dokumen Renstra dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| | | 2 | Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok, DPA Revisi dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100% |
| | | 3 | Jumlah Laporan Monev Pembangunan dan LAKIP Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% |
| Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah sesuai Standar dan Tepat Waktu | 1 | Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 25 ASN | 25 ASN | 98,28% |
| | | 2 | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| | | 3 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% |

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah



Pada Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah terdapat Indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Dimana, pada Indikator ini kita dapat mengetahui Capaian Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Yang di peroleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis ini , maka Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pencapaiannya diperlukan sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan yang telah dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat, yaitu Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan perkantoran dan layanan perizinan dan non perizinan.

MEMBANDINGKAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Adapun capaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen perkantoran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 30 :
Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Publik
pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2022

| No. | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-Rata |
|---------------------------|--|-----------------|
| U1 | Persyaratan | 3,89 |
| U2 | Sistim Mekanisme dan Prosedur | 3,88 |
| U3 | Waktu Penyelesaian | 3,85 |
| U4 | Biaya Tarif | 3,88 |
| U5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,88 |
| U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,89 |
| U7 | Perilaku Pelaksana | 3,89 |
| U8 | Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan | 3,80 |
| U9 | Sarana dan Prasarana | 3,90 |
| IKM UNIT PELAYANAN | | 97,6 |

| MUTU PELAYANAN | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Predikat Kinerja Layanan | | | |
| Tidak Baik | Kurang Baik | Baik | Sangat Baik |
| 25,00 – 64,99 | 65,00 – 76,60 | 76,61 – 88,30 | 88,31 – 100 |

Berdasarkan Tabel diatas diatas target indikator kinerja **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah**

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar itu telah mencapai target dan capaian ini melebihi target yang dicanangkan. Ini dapat diraih dari adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah yaitu Dari Kegiatan yang ada di Sekretariat dan Kegiatan dari Bidang Lingkup DPMPTSP.

Gambar 7 : Diagram Batang Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Pada Dinas PMPTSP Tahun 2022.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah Tahun 2022



MEMBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN LALU DAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar **menargetkan Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah “SANGAT BAIK”**. Target tersebut dapat dicapai sesuai target pada tahun 2022. Ini menandakan adanya capaian target yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Untuk Data capaian Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dari Tahun 2018 s/d Tahun 2022 dapat di sajikan datanya sebagai berikut :

Tabel 31 : Data Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2022

| No. | Indikator Kinerja | Tahun | | | |
|-----|--|-------|------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Indeks Kepuasan Masyarakat / Stakeholder | BAIK | BAIK | SANGAT BAIK | SANGAT BAIK |

Berdasarkan tabel diatas, Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berhasil mencapai capaian yang meningkat Capaiannya dari tahun ke tahun sehingga hasil evaluasi ini dapat memberikan penerapan manajemen kinerja perkantoran yang terukur dan terencana sesuai target yang di inginkan.

Indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Alokasi Anggaran Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

Tabel 32 : Alokasi Anggaran Penunjang Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik di Dinas PMPTSP tahun 2022

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Target | Realisasi | Persentase Capaian |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Rp. | Rp. | % |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | | | |
| | Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 |
| | | | | |
| | Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah | 243,768,900 | 243,436,390 | 99.86 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor | 3,764,500 | 3,764,500 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 15,400,000 | 15,400,000 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 31,925,200 | 31,925,200 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 7,080,000 | 7,080,000 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material | 57,879,100 | 57,879,100 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 127,720,100 | 127,387,590 | 99.74 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------|
| | Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penuhjang Pemerintah Daerah | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 |
| | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,500,000 | 48,500,000 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 11,200,000 | 11,200,000 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor P | 37,300,000 | 37,300,000 | 100.00 |
| | | | | |
| | Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97,899,850 | 97,899,850 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 42,404,350 | 42,404,350 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 27,495,500 | 27,495,500 | 100.00 |
| | Sub Kegiatan : Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 28,000,000 | 28,000,000 | 100.00 |
| e | | | | |

rdasarkan tabel diatas, Program dan Kegiatan yang digunakan dalam menunjang pencapaian indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 1 Program 5 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan.

ANALISIS KEBERHASILAN , KEGAGALAN DAN SOLUSI YANG DILAKUKAN

Secara umum Indikator Kinerja Sasaran **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah**

telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan di perjanjian kinerja tahun 2022,

Secara Analisis Keberhasilan dalam pencapaian target tersebut

adalah: Pada tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar menargetkan Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah "SANGAT BAIK". Dimana Target ini Realisasinya sampai akhir tahun 2022 mencapai Predikat "SANGAT BAIK", sehingga capaian kinerja dari indikator kinerja nilai realisasi 100 persen. Ini menandakan adanya Persentase yang sangat mendukung keberhasilan indikator kinerja ini yaitu :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah memiliki Dokumen Kepegawaian
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Pengadaan Barang Sarana dan Prasarana untuk kegiatankantor
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah Menyediakan Ketatausahaan Kantor yang sesuai standar dan prosedur
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan Menyediakan Penunjang Kegiatan Kantor

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar telah menyediakan Pemeliharaan sarana dan prasarana perlengkapan Gedung kantor

Dengan demikian realisasi target **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah** dapat mencapai target dan sekaligus mencapai capaian yang diharapkan tersebut dengan demikian target indikator ini dikategorikan **BERHASIL**

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA (ANGGARAN)

indikator kinerja **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah** sangat didukung oleh Sasaran Strategis / Kinerja Utama disertai Anggaran di Bagian Sekretariat DPMPTSP. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Efisiensi Sumber Daya yang dilakukan di beberapa kegiatan. Adapun Analisis sumber daya yang dilakukan pada Indikator Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 33

**ANALISIS EFISIENSI SUMBERDAYA YANG DILAKUKAN
PADA INDIKATOR KINERJA INDEKS KEPUASAN PENGGUNA
PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

| No. | Sasaran Strategis / Kinerja Utama | Anggaran | Realisasi | Persentase |
|-----|---|-------------|-------------|------------|
| | | Tahun 2022 | Anggaran | Capaian |
| | | Rp. | Rp. | % |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 243,768,900 | 243,436,390 | 99.86 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 48,500,000 | 48,500,000 | 100.00 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97,899,850 | 97,899,850 | 100.00 |

**ANALISIS
PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MENUNJANG KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Indikator kinerja **Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah** pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sangat didukung oleh Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan di Bagian Sekretariat. Hal ini dapat dilihat dari Analisis Program dan Kegiatan Penunjang keberhasilan pencapaian Kinerja Indeks Kepuasan masyarakat/Stakeholder Dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 34

| ANALISIS PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA | | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|------------|------------|------|
| INDEKS KEPUASAAN PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022 | | | | | | | |
| Jabatan | Kinerja Utama | Indikator Kinerja | Program / Kegiatan | Target | Realisasi | % Capaian | |
| Sekretaris | Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran | 1 | Persentase penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% | 100% | 100% |
| | | 2 | Persentase tertib ketatausahaan kantor | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | 100% | 100% |
| | | 3 | Persentase sarana dan prasarana kantor kondisi baik | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 100% | 100% | 100% |
| | | 4 | Persentase PNS perangkat daerah yang berkinerja baik | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi/Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 100% | 100% | 100% |
| | Meningkatnya penyampaian laporan aset sesuai standar dan tepat waktu | 1 | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10 Jenis | 10 Jenis | 100% |
| | Meningkatnya tertib ketatausahaan kantor | 1 | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% |
| | | 2 | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 Paket | 1 Paket | 100% |
| | | 3 | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang dibutuhkan | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6 Jenis | 6 Jenis | 100% |
| | | 4 | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% |
| Kasubag. Umum dan Kepegawaian | | 5 | Jumlah Barang penunjang kantor yang terbentuk karena ketersediaan bahan/material | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material | 31 Jenis | 31 Jenis | 100% |
| | | 6 | Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 65 Dokumen | 75 Dokumen | 110% |
| | | 7 | Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1000 Surat | 765 Surat | 78% |
| | | 8 | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan | Sub Kegiatan Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan | 3 Orang | 3 Orang | 0% |
| | | 9 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 10 Unit | 10 Unit | 0% |
| | | 10 | Jumlah jenis rehabilitasi gedung kantor yang dipelihara | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 9 Jenis | 9 Jenis | 100% |
| | | 11 | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang rusak ringan/sedang yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 Jenis | 5 Jenis | 0% |
| | | 12 | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% |

B. Akuntabilitas Keuangan



Pada Tahun 2022 Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar secara fisik terealisasi 97,33% sedangkan keuangan sebagian besar teralisasi 97,333%. Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung terealisasinya indikator kinerja yang

tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2019 – Tahun 2024.

Berikut ini adalah Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang dilaksanakan untuk mencapai indikator serta perbandingan realisasi dan target sesuai dengan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.

| NO | URAIAN PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 | |
|----|---|---|
| I | PROGRAM | PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 1 | Kegiatan | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
| | Sub Kegiatan | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 2 | Kegiatan | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD |
| 3 | Kegiatan | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |

| | | |
|-----|--------------|---|
| 1 | Sub Kegiatan | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi |
| 4 | Kegiatan | Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Bahan/Material |
| | Sub Kegiatan | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| 5 | Kegiatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |
| | Sub Kegiatan | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 6 | Kegiatan | Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 7 | Kegiatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| | Sub Kegiatan | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| II | PROGRAM | PROMOSI PENANAMAN MODAL |
| 1 | Kegiatan | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal |
| | Sub Kegiatan | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
| III | PROGRAM | PELAYANAN PENANAMAN MODAL |
| 1 | Kegiatan | Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota |
| | Sub Kegiatan | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah |
| IV | PROGRAM | PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL |

| | | |
|---|--------------|--|
| 1 | Kegiatan | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal |
| | Sub Kegiatan | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal |

REALISASI ANGGARAN Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan TAHUN ANGGARAN 2022

GAMBARAN UMUM PAGU ANGGARAN PADA DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) PERUBAHAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) TAHUN ANGGARAN 2022 ADALAH SEBESAR : Rp. 3,804,759,676.

(Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN | SEBESAR : Rp. 2.389.315.426 |
| 2. BELANJA KEGIATAN (DAU+DAK) | SEBESAR : Rp. 1,415,444,250 |

Adapun Rincian Belanja Kegiatan Sebagai Berikut:

- Belanja kegiatan DAU Sebesar Rp. 1.036.269.250
- Belanja Kegiatan DAK Sebesar Rp. 379.175.000

Untuk PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2023 adalah terdiri dari 4 Program, 10 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.

ADAPUN PENJABARAN REALISASI LAPORAN CAPAIAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN TAHUN 2022 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022 SEBESAR : Rp. 3,804,759,676.

ADAPUN CAPAIAN RINCIAN REALISASI ANGGARAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN : Rp. 2,348,122,948**
- 2. REALISASI ANGGARAN BELANJA KEGIATAN SEBESAR : Rp. 1,355,199,840**

Jadi TOTAL REALISASI ANGGARAN Tahun 2022 Sebesar Rp. 3,703,322,778

Dengan Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada DPA Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar : 97.33 %

JADI SISA DANA YANG BELUM TEREALISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2022 Per Tanggal 31 Desember 2022 Adalah sebesar : Rp. 101,436,888

DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. SISA DANA BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN : Rp. 41,192,478**
- 2. SISA DANA BELANJA KEGIATAN SEBESAR : Rp. 60,244,410**

DENGAN RINCIAN SISA DANA BELANJA KEGIATAN YAITU :

- SISA DANA DARI KEGIATAN DAU SEBESAR Rp. 966,610**
- SISA DANA DARI KEGIATAN DAK NON FISIK SEBESAR Rp. 59,277,800**

Tabel 35 : Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022

LAPORAN DATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

| NO. | URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PAGU DAN REALISASI ANGGARAN | | PERSEN TASE CAPAIAN ANGGARAN (%) | SISA /SELISIH DANA (SILPA) (Rp.) |
|-----|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) Per Tanggal 31 Desember 2022 | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | TOTAL BELANJA | | 3,804,759,676 | 3,703,322,788 | 97.33 | 101,436,888 |
| I | PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | 2,962,219,776 | 2,920,684,788 | 98.60 | 41,534,988 |
| | | Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah | | | | |
| | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | | | | |
| 1 | KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 7,820,700 | 7,820,700 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 2,843,300 | 2,843,300 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok, DPA Revisi dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | 3,540,800 | 3,540,800 | 100.00 | 0 |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 3 | SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monev Pembangunan dan LAKIP Perangkat Daerah | 1,436,600 | 1,436,600 | 100.00 | 0 |
| 2 | KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu | 2,393,009,326 | 2,351,816,848 | 98.28 | 41,192,478 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun | 2,389,315,426 | 2,348,122,948 | 98.28 | 41,192,478 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah | 2,206,000 | 2,206,000 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah | 1,487,900 | 1,487,900 | 100.00 | 0 |
| 3 | KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 | 10,000 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 | 10,000 |
| 4 | KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah | 243,768,900 | 243,436,390 | 99.86 | 332,510 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 3,764,500 | 3,764,500 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 15,400,000 | 15,400,000 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang dibutuhkan | 31,925,200 | 31,925,200 | 100.00 | 0 |
| 4 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 7,080,000 | 7,080,000 | 100.00 | 0 |
| 5 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Barang penunjang kantor yang terbentuk karena ketersediaan bahan/material | 57,879,100 | 57,879,100 | 100.00 | 0 |
| 6 | SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah | 127,720,100 | 127,387,590 | 99.74 | 332,510 |
| 5 | KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 | - |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 1 | SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 | 0 |
| 6 | KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 48,500,000 | 48,500,000 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar yang terkelola | 11,200,000 | 11,200,000 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan | 37,300,000 | 37,300,000 | 100.00 | 0 |
| 7 | KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 97,899,850 | 97,899,850 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | 42,404,350 | 42,404,350 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah jenis rehabilitasi gedung kantor yang dipelihara | 27,495,500 | 27,495,500 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang rusak ringan/sedang yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi | 28,000,000 | 28,000,000 | 100.00 | 0 |
| II | PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor | 288,482,300 | 287,897,500 | 99.80 | 584,800 |
| 1 | KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | 288,482,300 | 287,897,500 | 99.80 | 584,800 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Sosialisasi rencana Umum Penanaman Modal yang di Laksanakan | 84,364,100 | 84,326,100 | 99.95 | 38,000 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 2 | SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pameran yang diikuti | 204,118,200 | 203,571,400 | 99.73 | 546,800 |
| III | PROGRAM :PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 174,882,600 | 174,843,300 | 99.98 | 39,300 |
| 1 | KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dan Jenis pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan | 174,882,600 | 174,843,300 | 99.98 | 39,300 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Elektronik | 100,180,100 | 100,151,600 | 99.97 | 28,500 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Dokumen Data Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 74,702,500 | 74,691,700 | 99.99 | 10,800 |
| IV | PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Nilai realisasi Investasi daerah | 379,175,000 | 319,897,200 | 84.37 | 59,277,800 |
| 1 | KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terwujudnya aktivitas perusahaan PMDN/UMKM sesuai regulasiPenanaman Modal dan terlaksananya kemitraan para pelaku usaha PMDN/UMKM | 379,175,000 | 319,897,200 | 84.37 | 59,277,800 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksana kegiatan Bimtek LKPM Online dan Sosialisasi Kemitraan Usaha PMDN/UMKM | 257,773,500 | 214,860,400 | 83.35 | 42,913,100 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksana pengawasan penanaman modal | 121,401,500 | 105,036,800 | 86.52 | 16,364,700 |

Berdasarkan Realisasi Anggaran yang dicapai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 dengan capaian persentase 97,33 %.

Sebagai gambaran realisasi anggaran setiap tahunnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Berikut ini kami tampilkan di tabel realisasi anggaran dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 36 : Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2018 s/d 2022 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Polewali Mandar

| No. | Uraian | Tahun | | | | 2022 |
|-----|--------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Pagu Anggaran (Rp.) | 2.030.902.000 | 1.826.379.000 | 828.584.000 | 3,808,069,591 | 3,804,759,676 |
| 2 | Realisasi Anggaran (Rp.) | 2.028.062.925 | 1.824.265.725 | 828.039.802 | 3,746,396,770 | 3,703,322,788 |
| 3 | Persentase Capaian (%) | 99,86 | 99,88 | 99,93 | 98,38 | 97,33 |
| 4 | Sisa Anggaran (Rp.) | 2.839.075 | 2.113.275 | 544.198 | 61,672,821 | 101,436,888 |

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan Penjelasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok yang telah dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dilihat dari ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas fungsi dan kewajiban seperti tersebut diatas diperoleh dari laporan kinerja Bidang-bidang yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Program dan Kegiatan sesuai sasaran strategis.
3. Dalam pencapaian sasaran strategis dari masing-masing bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar sudah sebagian besar sudah mencapai target yang diharapkan.

Secara umum pelaksanaan berbagai kebijakan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurung waktu tahun 2022 terealisasi dengan baik dan juga masih perlu perbaikan target yang belum tercapai sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya untuk itu disarankan agar berjalan dengan baik perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Pokok agar dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perlu mengingatkan kualitas SDM dan seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar masih perlu meningkatkan capaian kinerja yang dilaksanakan agar apa yang perlu direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah optimal.

Demikian LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat pimpinan di daerah ini. Apabila diadakan penyusunan LAKIP ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu sangat diharapkan sumbang dan saran dan berbagai pihak untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimasa datang demi penyempurnaan LAKIP ini ditahun mendatang.

Polewali, 10 Februari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar,



Dr. MUJAHIDIN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014

| | |
|--|--|
| | <p>LAMPIRAN</p> <p>LAKIP DPMPSTSP</p> <p>TAHUN 2022</p> |
|--|--|

LAMPIRAN I

Perjanjian Kinerja Tahun 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali kode Pos 91315

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. MUJAHIDIN. M. Si**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ANDI IBRAHIM MASDAR**

Jabatan : Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua,
Bupati Polewali Mandar


H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Drs. MUJAHIDIN, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660606 199803 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN 2021 | TARGET 2022 |
|----|---|--|---------------------|----------------------|
| 1 | Membbaiknya iklim investasi daerah | Nilai Investasi | 79.507.530.000 (Rp) | 118.450.000.000 (Rp) |
| 2 | Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu | Indeks kepuasan pengguna pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | Predikat SAKIP perangkat daerah | A | A |
| | | Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100% | 100% |
| | | Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Baik | Sangat Baik |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN | KETERANGAN |
|---------------|---|-------------------------|-------------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 2,873,581,579 | APBD |
| 2 | Promosi Penanaman Modal | Rp 127,633,000 | APBD |
| 3 | Pelayanan Penanaman Modal | Rp 163,370,400 | APBD |
| 4 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp 379,175,000 | APBD |
| JUMLAH | | Rp 3,543,759,979 | APBD |

Polewali, 21 Maret 2022

Pihak Kedua
 BUPATI POLEWALI MANDAR,



H. ANDI IBRAHIM MASDAR

Pihak Pertama
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. MUJAHIDIN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

LAMPIRAN II

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL PTSP**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN | TARGET | CAPAIAN TARGET KINERJA | % |
|-----|---|--|-----------------|------------------------|-------|
| 1 | Membbaiknya iklim investasi daerah | 1 Nilai Investasi | 118.450.000.000 | 186.523.356.799 | 157 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan pelayanan perizinan terpadu satu pintu | 1 Indeks kepuasan pengguna pelayanan | Sangat Baik | Sangat Baik | 100 |
| 3 | Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah | 1 Predikat SAKIP perangkat daerah | Baik | Baik | 100 |
| | | 2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah | 100 | 97,33 | 97,33 |
| | | 3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah | Sangat Baik | Sangat Baik | 100 |

Polewali, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar,



Drs. MUJAHIDIN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014

LAMPIRAN III

Realisasi Anggaran Tahun 2022

**LAPORAN DATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2022
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

| NO. | URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | PAGU DAN REALISASI ANGGARAN | | PERSENTASE CAPAIAN ANGGARAN (%) | SISA /SELISIH DANA (SILPA) (Rp.) |
|----------|--|--|--|---|---------------------------------|----------------------------------|
| | | | PAGU ANGGARAN DPA PERUBAHAN TAHUN 2022 (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) Per Tanggal 31 Desember 2022 | | |
| (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| I | TOTAL BELANJA | | 3,804,759,676 | 3,703,322,788 | 97.33 | 101,436,888 |
| I | PROGRAM : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA | Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah | 2,962,219,776 | 2,920,684,788 | 98.60 | 41,534,988 |
| | | Opini Pengelolaan Keuangan perangkat daerah | | | | |
| | | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) | | | | |
| 1 | KEGIATAN : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 7,820,700 | 7,820,700 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah sesuai standar dan tepat waktu | 2,843,300 | 2,843,300 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA/DPA Pokok, DPA Revisi dan DPA Perubahan Perangkat Daerah | 3,540,800 | 3,540,800 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Monev Pembangunan dan LAKIP Perangkat Daerah | 1,436,600 | 1,436,600 | 100.00 | 0 |
| 2 | KEGIATAN : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Penyampaian Laporan Keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu | 2,393,009,326 | 2,351,816,848 | 98.28 | 41,192,478 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------|--------------------|--------------|----------------|
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang masuk daam Daftar Gaji/ Ampra Gaji bulanan dalam satu tahun | 2,389,315,426 | 2,348,122,948 | 98.28 | 41,192,478 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah | 2,206,000 | 2,206,000 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semester an SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran Perangkat Daerah | 1,487,900 | 1,487,900 | 100.00 | 0 |
| 3 | KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Kepegawaian yang lengkap | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 | 10,000 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | 4,500,000 | 4,490,000 | 99.78 | 10,000 |
| 4 | KEGIATAN : Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase Administrasi Umum yang tersedia pada Kantor Perangkat Daerah | 243,768,900 | 243,436,390 | 99.86 | 332,510 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 3,764,500 | 3,764,500 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang tersedia | 15,400,000 | 15,400,000 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan kantor yang dibutuhkan | 31,925,200 | 31,925,200 | 100.00 | 0 |
| 4 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia | 7,080,000 | 7,080,000 | 100.00 | 0 |
| 5 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Barang penunjang kantor yang terbentuk karena ketersediaan bahan/material | 57,879,100 | 57,879,100 | 100.00 | 0 |
| 6 | SUB KEGIATAN : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah | 127,720,100 | 127,387,590 | 99.74 | 332,510 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 5 | KEGIATAN : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Presentase Pengadaan baru Barang Milik Perangkat Daerah | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 166,721,000 | 166,721,000 | 100.00 | 0 |
| 6 | KEGIATAN : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Tagihan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 48,500,000 | 48,500,000 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Surat masuk dan keluar yang dikelola | 11,200,000 | 11,200,000 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan | 37,300,000 | 37,300,000 | 100.00 | 0 |
| 7 | KEGIATAN : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah | 97,899,850 | 97,899,850 | 100.00 | - |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dibayarkan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan | 42,404,350 | 42,404,350 | 100.00 | 0 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah jenis rehabilitasi gedung kantor yang dipelihara | 27,495,500 | 27,495,500 | 100.00 | 0 |
| 3 | SUB KEGIATAN : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang rusak ringan/ sedang yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi | 28,000,000 | 28,000,000 | 100.00 | 0 |
| II | PROGRAM : PROMOSI PENANAMAN MODAL | Jumlah Investor | 288,482,300 | 287,897,500 | 99.80 | 584,800 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 | KEGIATAN : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal | 288,482,300 | 287,897,500 | 99.80 | 584,800 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal | Jumlah Sosialisasi rencana Umum Penanaman Modal yang di Laksanakan | 84,364,100 | 84,326,100 | 99.95 | 38,000 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pameran yang diikuti | 204,118,200 | 203,571,400 | 99.73 | 546,800 |
| III | PROGRAM : PELAYANAN PENANAMAN MODAL | Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan | 174,882,600 | 174,843,300 | 99.98 | 39,300 |
| 1 | KEGIATAN : Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah dan Jenis pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan | 174,882,600 | 174,843,300 | 99.98 | 39,300 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Dokumen Layanan Perizinan dan Non Perizinan yang diproses melalui Elektronik | 100,180,100 | 100,151,600 | 99.97 | 28,500 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Dokumen Data Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | 74,702,500 | 74,691,700 | 99.99 | 10,800 |
| IV | PROGRAM : PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Nilai realisasi Investasi daerah | 379,175,000 | 319,897,200 | 84.37 | 59,277,800 |

| | | | | | | |
|---|---|---|-------------|-------------|-------|------------|
| 1 | KEGIATAN : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase terwujudnya aktivitas perusahaan PMDN/UMKM sesuai regulasi Penanaman Modal dan terlaksananya kemitraan para pelaku usaha PMDN/UMKM | 379,175,000 | 319,897,200 | 84.37 | 59,277,800 |
| 1 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksana kegiatan Bimtek LKPM Online dan Sosialisasi Kemitraan Usaha PMDN/UMKM | 257,773,500 | 214,860,400 | 83.35 | 42,913,100 |
| 2 | SUB KEGIATAN : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah pelaksana pengawasan penanaman modal | 121,401,500 | 105,036,800 | 86.52 | 16,364,700 |

Polewali, 02 Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Polewali Mandar,



Drs. MUJAHIDIN, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660606 199803 1 014